



PEMERINTAH
KOTA SALATIGA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KOTA SALATIGA
TAHUN 2022**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahNya, Pemerintah Kota Salatiga telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2022. Penyusunan laporan kinerja pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kota Salatiga dalam mencapai misi dan tujuan serta dalam rangka perwujudan *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kota Salatiga Tahun 2022 ini menyajikan realisasi kinerja atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2022 yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Salatiga dan merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022 untuk tahun yang keempat. Secara Umum realisasi kinerja Pemerintah Kota Salatiga dalam kriteria sangat baik, artinya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dialokasikan pada tahun 2022 telah berhasil, sehingga target-target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Salatiga tahun 2022. Semoga LKjIP Kota Salatiga Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Salatiga, Maret 2023
Pj.WALI KOTA SALATIGA,


Drs. SINOENG N. RACHMADI, M.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini merupakan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun ke-4 periode RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel. Pengumpulan data dan analisa dilakukan terhadap sasaran pembangunan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Walikota yang telah dicanangkan pada tahun 2022.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 14 sasaran dengan 22 indikator kinerja utama berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga tahun 2022 disimpulkan bahwa **13** (tiga belas) Indikator Kinerja Utama atau **54,55%** dikategorikan **Sangat Baik**, **6** (enam) Indikator Kinerja Utama atau **27,27%** dikategorikan **Baik**, **2** (dua) Indikator Kinerja Utama atau **9,09%** dikategorikan **Cukup**, dan **1** (satu) Indikator Kinerja Utama atau **4,55%** dikategorikan **Kurang**.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Kategori
1	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat	Rata Rata Lama Sekolah	9,95 tahun	10,95 tahun	110,05%	Sangat Baik
		Harapan Lama Sekolah	14,99 tahun	15,43 tahun	102,94%	Sangat Baik
2	Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga	Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan	58%	190,17%	327,88%	Sangat Baik
3	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peringkat dalam Porda	Ranking 5	Ranking 6	80,00%	Baik
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Angka Usia Harapan Hidup	77,4 tahun	77,72 tahun	100,41%	Sangat Baik
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,32%	0,80%	139,39%	Sangat Baik
5	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Indeks/ Angka Kriminalitas	0,06	0,030	150,00%	Sangat Baik
6	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	kawasan wajah Kota yang tertata dengan baik	75%	50%	66,67%	Cukup



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Kategori
7	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana drainase, pengairan dan saluran pembuangan limbah	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	100 %	98,19%	98,19%	Baik
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	85	61,34	72,16%	Cukup
9	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	3,99 %	1,84%	153,88%	Sangat Baik
10	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk	Pertumbuhan ekonomi	5,45 %	5,53%	101,47%	Sangat Baik
		PDRB Perkapita (ribu rupiah)	73.893	78.987	106,89%	Sangat Baik
11	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan nilai investasi	3 %	-70,29%	-2342,91%	Kurang
		Tingkat pengangguran terbuka	5,73 %	5,58%	102,62%	Sangat Baik
12	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Prosentase Penduduk Miskin	4,7 %	4,73%	99,36%	Baik
		Skor Pola Pangan Harapan	92,2	95,1	103,15%	Sangat Baik
13	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Skor capaian Kota Layak Anak (KLA)	680	607,35	89,32%	Baik
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,2	95,44	98,19	Baik
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,57	79,29	97,20	Baik
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	84,2	84,35	100,18%	Sangat Baik

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Kategori
14	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	65	74,98	115,35%	Sangat Baik

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pencapaian 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama, telah dianggarkan melalui APBD Kota Salatiga sebesar Rp1.046.499.128.242,00,- dengan realisasi sebesar Rp929.681.271.274,00,- atau sebesar 88,84%.

Berdasarkan data diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian 22 indikator kinerja Pemerintah Kota Salatiga sebesar 99,11%.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Salatiga kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan dan Manfaat.....	2
1. Tujuan.....	2
2. Manfaat	2
D. Gambaran Umum.....	3
1. Aspek Geografis	3
2. Aspek Demografis	7
3. Aspek Pemerintahan	8
E. Isu Strategis Pembangunan.....	13
F. Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis.....	18
1. Visi	18
2. Misi	20
3. Tujuan dan Sasaran	21
B. Arah Kebijakan Jangka Menengah.....	25
1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	25
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	26
C. Prioritas Pembangunan	27
D. Perjanjian Kinerja.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	35
1. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata Bagi Seluruh Masyarakat	37
1.1. Rata-Rata Lama Sekolah	38
1.2. Harapan Lama Sekolah.....	41
2. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Apresiasi Pada Seni dan Karya Budaya serta Melestarikan Warisan Budaya Kota Salatiga	44
3. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga.....	48
4. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.....	51
4.1. Angka Usia Harapan Hidup	51
4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	55



5. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Tenar, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan.....	59
6. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata.....	64
7. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Drainase, Pengairan dan Saluran Pembuangan Limbah	68
8. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	72
9. Tujuan/Sasaran Strategis Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perkotaan yang Merata Bagi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup.....	78
10. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk	82
10.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	83
10.2. PDRB perkapita.....	88
11. Tujuan/Sasaran Strategis Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong Pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi Dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga.....	91
11.1. Pertumbuhan Nilai Investasi.....	92
11.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	95
12. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial	99
12.1. Persentase Penduduk Miskin	99
12.2. Skor Pola Pangan Harapan	103
13. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender	108
13.1. Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	108
13.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	111
13.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	115
13.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	118
14. Tujuan/ Sasaran Strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	120



B. Realisasi Anggaran	131
BAB IV PENUTUP	134

LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja**
- 2. Capaian IKU dan IKD Tahun 2022**
- 3. Cascading 2022**





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kota Salatiga.....	4
Gambar 1.2 Letak Kota Salatiga dalam Konstalasi Jawa Tengah	5





DAFTAR TABEL

1.1	Luas Wilayah Administratif dan Jumlah RT/RW	5
1.2	Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin.....	7
1.3	Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2022.....	8
1.4	Jumlah PNS Kota Salatiga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	11
1.5	Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2022	12
2.1	Penjelasan Makna Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”	19
2.2	Persandingan Visi Kota Salatiga dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah	20
2.3	Keterkaitan antar unsur Visi RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 Ke dalam masing-masing misi.....	21
2.4	Rencana Kinerja Kota Salatiga Tahun 2022	28
3.1	Scala Ordinal Pencapaian Indikator Tujuan/Sasaran Strategis	36
3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-Rata Lama Sekolah	38
3.3	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah	40
3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Harapan Lama Sekolah	41
3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah.....	43
3.6	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan.....	45
3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan	47
3.8	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Peringkat Dalam Porda.....	48
3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Peringkat Dalam Porda	50
3.10	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Usia Harapan Hidup	52
3.11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Angka Usia Harapan Hidup	53
3.12	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju Pertumbuhan Penduduk.....	55
3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk.....	57
3.14	Data Perkembangan Tindak Kriminal Tahun 2017-2022.....	59
3.15	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Angka Kriminalitas .	60
3.16	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks Angka Kriminalitas	61
3.17	Target Penataan Kawasan Wajah Kota	65
3.18	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik	65
3.19	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Kawasan Wajah Kota Yang Tertata dengan Baik	67



3.20	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik.....	69
3.21	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	71
3.22	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	73
3.23	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	75
3.24	Data Perkembangan Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2017-2021.....	78
3.25	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	79
3.26	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	80
3.27	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pertumbuhan Ekonomi	83
3.28	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi.....	85
3.29	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PDRB Perkapita	88
3.30	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja PDRB Perkapita.....	90
3.31	Perkembangan Nilai Investasi 2017- 2022	92
3.32	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pertumbuhan Nilai Investasi.....	93
3.33	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi.....	94
3.34	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Pengangguran Terbuka.....	96
3.35	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka	97
3.36	Penduduk Miskin Kota Salatiga 2017 – 2022	100
3.37	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penduduk Miskin	100
3.38	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin.....	102
3.39	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pola Pangan Harapan.....	103
3.40	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Pola Pangan Harapan	105
3.41	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kota Layak Anak ..	108
3.42	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Capaian Kota Layak Anak.....	110
3.43	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pembangunan Gender	112
3.44	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender	113
3.45	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pemberdayaan Gender	115



3.46 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender.....	117
3.47 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pembangunan Manusia	118
3.48 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks PMPRB	121
3.49 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks PMPRB.....	123
3.50 Perkembangan PAD Kota Salatiga Tahun 2012-2022	132
4.1 Data Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2022.....	134



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good governance*) merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, demokrasi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
2. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
3. Demokrasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal itu Pemerintah Kota Salatiga harus memiliki visi dan misi serta strategi yang jelas dan tepat untuk mencapai tujuan dan sasarannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu wujud upaya untuk mengetahui keseimbangan peran dan fungsi serta meningkatkan kinerja pemerintah adalah dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat memberikan gambaran pada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk

mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat;
- b. Sebagai informasi kepada publik atas kinerja Pemerintah Kota Salatiga untuk memberikan saran/masukan dalam perbaikan kinerja.

2. Manfaat

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Salatiga;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2022;
- c. Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota salatiga di masa yang akan datang.

D. GAMBARAN UMUM

1. Aspek Geografis

Kota Salatiga secara astronomis terletak antara 007°.17' dan 007°.17'.23" Lintang Selatan, dan antara 110°.27'.56,81" dan 110°.32'.4,64" Bujur Timur. Kota Salatiga memiliki ketinggian 450-825 meter di atas permukaan air laut (DPL) dengan suhu rata-rata 23°C - 28°C, sehingga menyebabkan kondisi udara menjadi sejuk.

Secara morfologi Kota Salatiga berada di daerah cekungan kaki gunung Merbabu dan dikelilingi gunung-gunung kecil antara lain adalah Gunung Gajah Mungkur, Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong. Keberadaan gunung-gunung tersebut menyebabkan tanah di Kota Salatiga menjadi subur dan memiliki potensi alam yang cukup besar.

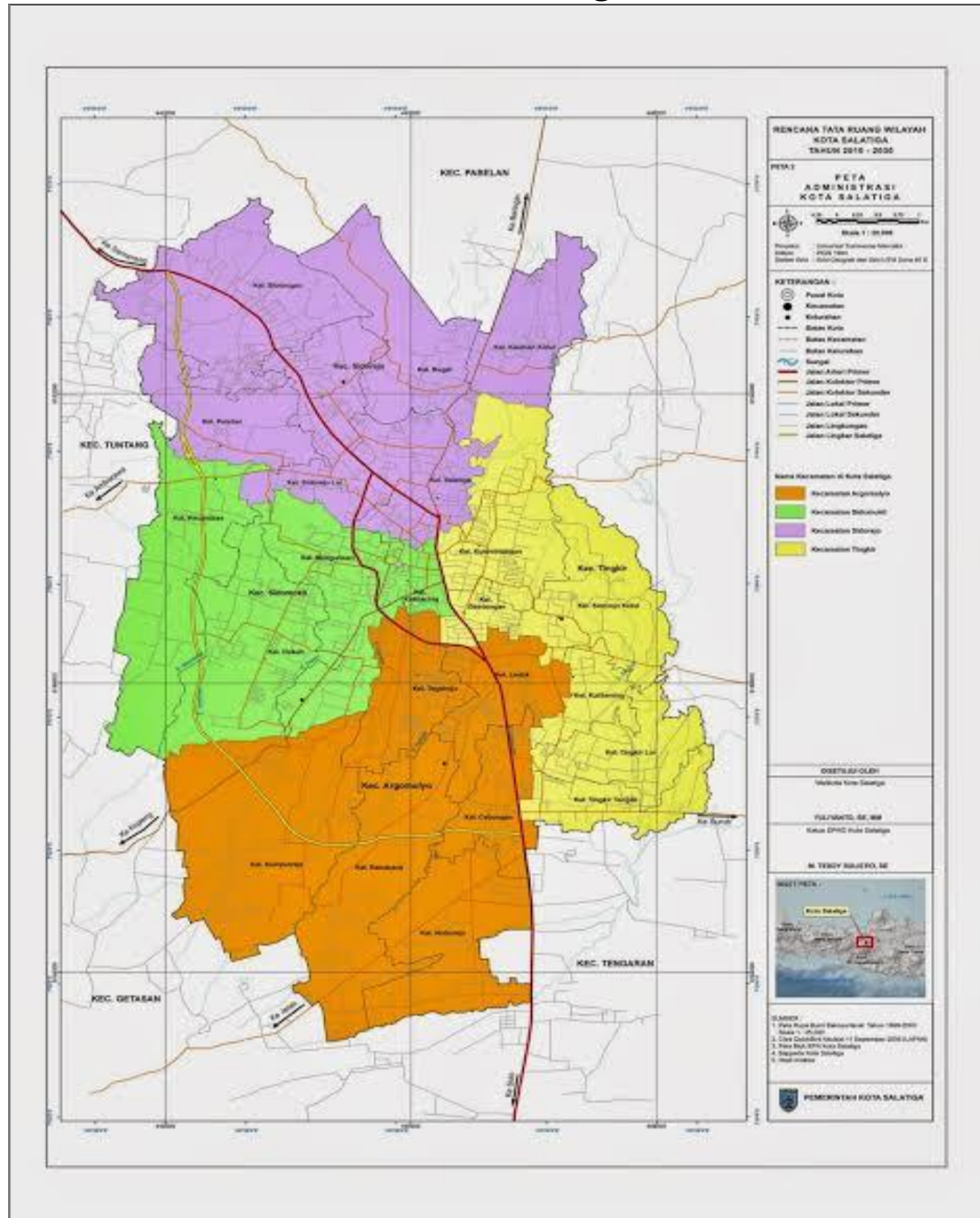
Berdasarkan topografi, wilayah Kota Salatiga terdiri dari 3 topografi yaitu daerah bergelombang (65%), daerah miring (25%), dan daerah datar (10%).

Wilayah administrasi Kota Salatiga berada ditengah-tengah Kabupaten Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan:
 - Kecamatan Pabelan : Desa Pabelan, Desa Pejanten
 - Kecamatan Tuntang : Desa Kesongo, Desa Watu Agung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan:
 - Kecamatan Pabelan : Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan
 - Kecamatan Tengaran: Desa Bener, Desa Tegal Waton, Desa Nyamat
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan:
 - Kecamatan Getasan : Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak
 - Kecamatan Tengaran: Desa Patemon, Desa Karang Duren
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan:
 - Kecamatan Tuntang : Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedongan
 - Kecamatan Getasan : Desa Polobogo Kecamatan Getasan.

Adapun Peta Kota Salatiga disajikan pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Peta Kota Salatiga



Sumber : Dokumen RTRW Kota Salatiga

Kota Salatiga merupakan salah satu bagian dari 6 kota yang ada dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota Salatiga berjarak ± 53 kilometer dari Kota Surakarta dan ± 50 kilometer dari Kota Semarang, serta dilintasi jalur arteri primer (jalan nasional) Jakarta-Semarang-Surakarta. Karena menjadi perlintasan dua kota besar di Jawa Tengah (Semarang-Surakarta) dan perlintasan dari Jawa Timur (jalur tengah) ke Jawa Barat, maka transportasi darat yang melalui Kota Salatiga cukup ramai. Hal ini sebagai indikasi bahwa Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah penting dan strategis di Jawa Tengah. Letak Kota Salatiga dalam konstalasi Jawa Tengah disajikan dalam gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar I.2
Letak Kota Salatiga dalam Konstalasi Jawa Tengah



Sumber : Dokumen RTRW Kota Salatiga

Luas wilayah Kota Salatiga pada tahun 2022 tercatat sebesar 5678 Ha, terbagi menjadi 4 (empat) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan yang terdiri dari 1.142 Rukun Tetangga (RT) dan 209 Rukun Warga (RW). Adapun rincian luas wilayah kecamatan dan kelurahan serta jumlah RT maupun RW di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Administratif dan Jumlah RT/RW

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	KECAMATAN SIDOREJO	318	61
	1. Kelurahan Blotongan	74	15
	2. Kelurahan Bugel	21	6
	3. Kelurahan Kauman Kidul	25	7
	4. Kelurahan Pulutan	20	5
	5. Kelurahan Salatiga	83	12
	6. Kelurahan Sidorejo Lor	95	16
2.	KECAMATAN TINGKIR	303	49
	1. Kelurahan Gendongan	38	5
	2. Kelurahan Kalibening	9	3
	3. Kelurahan Kutowinangun Lor	91	6
	4. Kelurahan Kutowinangun Kidul	70	8
	5. Kelurahan Sidorejo Kidul	38	9
	6. Kelurahan Tingkir Lor	25	8
	7. Kelurahan Tingkir Tengah	32	10
3.	KECAMATAN SIDOMUKTI	237	40
	1. Kelurahan Dukuh	75	10
	2. Kelurahan Kalicacing	39	7
	3. Kelurahan Kecandran	27	7
	4. Kelurahan Mangunsari	96	16

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
4.	KECAMATAN ARGOMULYO	284	59
	1. Kelurahan Cebongan	25	6
	2. Kelurahan Kumpulrejo	44	10
	3. Kelurahan Ledok	72	14
	4. Kelurahan Noborejo	37	10
	5. Kelurahan Randuacir	43	10
	6. Kelurahan Tegalrejo	63	9
	JUMLAH	1142	209

Sumber : Data Statistik Sektoral 2022

Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 135.2/0012576 tentang penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah tanggal 18 September 2020, dengan telah ditetapkannya segmen batas daerah antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang maka Luas wilayah administrasi Kota Salatiga terjadi perubahan dimana luas sebelumnya 5678 Ha menjadi seluas 5498 Ha.

Kota Salatiga merupakan bagian dari kawasan Strategis Nasional Kedungsepur. Kawasan ini selain didukung oleh potensi sumber daya alam dan prasarana juga memiliki letak strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Strategi pengembangan untuk kawasan ini adalah secara intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitas jalur Pantura dan secara interregional dan nasional merupakan tempat transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga, pembagian struktur ruang wilayah di Kota Salatiga, masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pusat Pelayanan Kota adalah sebagai pusat perdagangan jasa dan perkantoran, meliputi:
 - Kelurahan Salatiga
 - Kelurahan Kutowinangun
 - Kelurahan Gendongan
 - Kelurahan Kalicacing
- b. Subpusat Pelayanan Kota Sidorejo adalah sebagai pusat pengembangan pendidikan tinggi dan pariwisata. Terletak di Kelurahan Sidorejo Lor.
- c. Subpusat Pelayanan Kota Sidomukti adalah sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan dan pemukiman. Terletak di Kelurahan Mangunsari.
- d. Subpusat Pelayanan Kota Argomulyo adalah sebagai pengembangan kegiatan yang berbasis pertanian (agrowisata dan agroindustri) dan industri. Terletak di Kelurahan Randuacir.

- e. Subpusat Pelayanan Kota Tingkir adalah sebagai pengembangan kegiatan yang berbasis industri dan pertanian lahan basah. Terletak di Kelurahan Sidorejo Kidul.
- f. Pusat Lingkungan, sebagai pusat pelayanan lokal meliputi pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi, meliputi:
 - Kelurahan Blotongan
 - Kelurahan Bugel
 - Kelurahan Kauman Kidul
 - Kelurahan Pulutan
 - Kelurahan Kalibening
 - Kelurahan Tingkir Lor
 - Kelurahan Tingkir Tengah
 - Kelurahan Noborejo
 - Kelurahan Ledok
 - Kelurahan Tegalrejo
 - Kelurahan Kumpulrejo
 - Kelurahan Cebongan
 - Kelurahan Kecandran
 - Kelurahan Dukuh

2. Aspek Demografis

Jumlah penduduk di Kota Salatiga pada tahun 2022 sebanyak 200.220 jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 3.780 jiwa atau 1,92% dibandingkan tahun 2021. Jumlah penduduk laki-laki tahun 2022 adalah sebanyak 99.403 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 100.817 jiwa. Rasio jenis kelamin Kota Salatiga sebesar 98,60% atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Data jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kota Salatiga tahun 2017-2022 disajikan pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	2017	95.381	96.697	192.078	98,64
2	2018	96.490	98.121	194.611	98,34
3	2019	97.026	98.537	195.563	98,46
4	2020	97.326	98.756	196.082	98,55
5	2021	97.382	99.058	196.440	98,31
6	2022	99.403	100.817	200.220	98,60

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga

Persebaran penduduk Kota Salatiga tahun 2022 tertinggi terdapat di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 55.215 jiwa dan terendah terdapat di Kecamatan Sidomukti dengan jumlah penduduk 45.131 jiwa. Data persebaran penduduk per

Kecamatan di Kota Salatiga pada tahun 2022 disajikan pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
per Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2022

No	Kecamatan/Kelurahan	L	P	Jumlah
1.	KECAMATAN SIDOREJO	27.254	27.961	55.215
	1.Kelurahan Salatiga	7.235	7.450	14.685
	2.Kelurahan Bugel	1.799	1.792	3.591
	3.Kelurahan Sidorejo Lor	7.141	7.480	14.621
	4.Kelurahan Blotongan	6.618	6.651	13.269
	5.Kelurahan Pulutan	2.349	2.380	4.729
	6.Kelurahan Kauman Kidul	2.112	2.208	4.320
2.	KECAMATAN TINGKIR	23.601	24.098	46.924
	1.Kelurahan Kalibening	1.219	1.152	2.371
	2.Kelurahan Sidorejo Kidul	3.811	3.917	7.728
	3.Kelurahan Kutowinangun Lor	6.557	6.686	13.243
	4.Kelurahan Kutowinangun Kidul	4.039	4.240	8.279
	5.Kelurahan Gendongan	2.675	2.783	5.458
	6.Kelurahan Tingkir Tengah	2.739	2.730	5.469
	7.Kelurahan Tingkir Lor	2.561	2.590	5.151
3.	KECAMATAN ARGOMULYO	25.857	25.685	50.549
	1.Kelurahan Ledok	5.632	5.630	11.262
	2.Kelurahan Cebongan	2.654	2.645	5.299
	3.Kelurahan Tegalrejo	6.388	6.261	12.649
	4.Kelurahan Randuacir	3.509	3.469	6.978
	5.Kelurahan Kumpulrejo	4.256	4.244	8.500
	6.Kelurahan Noborejo	3.418	3.436	6.854
4.	KECAMATAN SIDOMUKTI	22.691	23.073	45.131
	1.Kelurahan Mangunsari	8.781	8.887	17.668
	2.Kelurahan Dukuh	7.181	7.337	14.518
	3.Kelurahan Kecandran	3.680	3.620	7.300
	4.Kelurahan Kalicacing	3.049	3.229	6.278
	JUMLAH	99.403	100.817	200.220

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga

3. Aspek Pemerintahan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan berpegang pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan dari suatu daerah.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan, potensi

dan kemampuan daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara arif, adil dan selaras serta perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan peran tersebut daerah telah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan otonomi daerah Pemerintah Kota Salatiga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah seperti tersebut diatas, maka susunan organisasi Pemerintah Kota Salatiga terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah Tipe B merupakan unsur staf;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur staf pendukung DPRD;
- c. Inspektorat Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 2. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 3. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 4. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
 7. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan;

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan bidang kearsipan;
 10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 13. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 14. Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, serta bidang kelautan dan perikanan;
 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dan bidang pariwisata;
 18. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 19. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi.
- e. Badan Daerah berjumlah 3 (tiga) terdiri dari:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Besar melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana.
- f. Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, terdiri atas:
 1. Kecamatan Argomulyo Tipe A
 2. Kecamatan Sidorejo Tipe A;
 3. Kecamatan Tingkir Tipe A; dan
 4. Kecamatan Sidomukti Tipe B.
- g. Selain Perangkat Daerah sebagaimana diatas, dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan yang berjumlah 23 (dua puluh tiga).

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya aparatur yang memadai. Pada Tahun 2022 jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebanyak 3335 Orang, yang terdiri dari 1419 laki-laki dan 1916 perempuan. Selengkapnya jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah PNS Kota Salatiga
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	L	P	JUMLAH
1	Inspektorat Daerah	21	17	38
2	Sekretariat Daerah	67	53	120
3	Sekretariat DPRD	14	13	27
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19	22	41
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16	16	32
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	40	26	66
7	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11	21	32
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	5	12
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11	13	24
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	18	13	31
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	13	27
12	Dinas Kesehatan	70	278	348
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	28	13	41
14	UPT Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan	161	292	453
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	10	24
16	Dinas Lingkungan Hidup	109	17	126
17	Dinas Pangan dan Pertanian	36	34	70

NO	PERANGKAT DAERAH	L	P	JUMLAH
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34	12	46
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	22	36
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	10	20
21	Dinas Pendidikan	391	779	1170
22	Dinas Perdagangan	48	16	64
23	Dinas Perhubungan	24	12	36
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15	11	26
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13	19	32
26	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	23	17	40
27	Dinas Sosial	15	22	37
28	Satuan Polisi Pamong Praja	39	8	47
29	Kecamatan Tingkir	42	39	81
30	Kecamatan Sidorejo	34	30	64
31	Kecamatan Sidomukti	23	31	54
32	Kecamatan Argomulyo	38	32	70
	TOTAL	1419	1916	3335

Sumber : BKPSDM Kota Salatiga

Sedangkan komposisi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan jabatan tahun 2022 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5
Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	STRUKTURAL	PELAKSANA	FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Inspektorat Daerah	7	6	25	38
2	Sekretariat Daerah	21	54	45	120
3	Sekretariat DPRD	5	13	9	27
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	15	21	41
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	14	11	32
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	21	32	13	66
7	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7	12	13	32
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	7	0	12
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5	13	6	24
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	20	6	31
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	11	10	27

NO	PERANGKAT DAERAH	STRUKTURAL	PELAKSANA	FUNGSIONAL	JUMLAH
12	Dinas Kesehatan	8	69	271	348
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	15	19	41
14	UPT RSUD pada Dinas Kesehatan	8	91	354	453
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	13	5	24
16	Dinas Lingkungan Hidup	8	109	9	126
17	Dinas Pangan dan Pertanian	8	28	34	70
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	17	20	46
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	17	11	36
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	9	8	20
21	Dinas Pendidikan	11	55	1104	1170
22	Dinas Perdagangan	10	45	9	64
23	Dinas Perhubungan	10	17	9	36
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7	11	8	26
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	4	22	32
26	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8	26	6	40
27	Dinas Sosial	6	13	18	37
28	Satuan Polisi Pamong Praja	13	17	17	47
29	Kecamatan Tingkir	43	32	6	81
30	Kecamatan Sidorejo	36	23	5	64
31	Kecamatan Sidomukti	27	23	4	54
32	Kecamatan Argomulyo	37	28	5	70
	TOTAL	373	859	2103	3335

Sumber : BKPSDM Kota Salatiga

E. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan dirumuskan sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran terbuka dan penduduk miskin akibat dampak Covid-19;
2. Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
3. Pembinaan dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan serta kesenjangan pendapatan penduduk;
4. Pemberdayaan masyarakat dan penanganan penyandang permasalahan kesejahteraan sosial;
5. Pemenuhan pelayanan infrastruktur kota;
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan serta penegakan hukum pelanggaran tata ruang;
7. Pengelolaan, pelestarian cagar budaya dan kesenian daerah;
8. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah.

Berkaca pada kondisi perekonomian di tahun 2022 dan target pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2022, maka perekonomian Kota Salatiga masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh melemahnya ekonomi global dan adanya pandemi Covid-19. Beberapa tantangan yang akan dihadapi antara lain:

1. Bertambahnya angka pengangguran terbuka
Dengan terjadinya Pandemi Covid 19 khususnya di Kota Salatiga hal ini berakibat pada penambahan jumlah pengangguran yang mana pada akhir tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka Kota Salatiga mencapai 7,21%, sehingga diperkirakan pada semester 1 tahun 2022 angka ini akan bertambah.
2. Bertambahnya jumlah penduduk miskin
Pada akhir tahun 2021, persentase penduduk miskin Kota Salatiga yaitu 5,14%, angka ini meningkat jika dibanding tahun 2020. Dengan adanya pandemi covid-19 yang berdampak signifikan pada sektor ekonomi, diperkirakan jumlah penduduk miskin Kota Salatiga juga bertambah. Harapan pada akhir tahun 2022 jumlah penduduk miskin Kota Salatiga akan mengalami penurunan. Data BPS, persentase kemiskinan di Jawa Tengah turun 0,86 persen apabila dibandingkan pada bulan Maret 2021 sebesar 11,79 persen.
3. Menurunnya penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan
Dampak pandemi covid-19 pada sektor keuangan negara berimbas pada dana transfer pusat ke daerah. Penurunan ini akan berdampak pada menurunnya pendapatan daerah yang harus diimbangi dengan menurunkan belanja daerah.
4. Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif
Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan iklim berinvestasi yang kondusif dan kompetitif

dengan mewujudkan mall pelayanan publik serta meningkatkan kualitas pelayanannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menarik investor guna menggerakkan roda perekonomian daerah.

5. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang akan berpengaruh pada perekonomian Kota Salatiga

Berdasarkan evaluasi permasalahan pencapaian target kinerja program, pandemi Covid-19 masih menjadi permasalahan utama. Dengan demikian, prioritas penyelesaian diarahkan kepada penanganan pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengalokasian anggaran pada urusan kesehatan
Anggaran pada bidang kesehatan digunakan untuk belanja penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan Covid-19 di wilayah, insentif tenaga kesehatan serta belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Pengalokasian anggaran tersebut walaupun secara tidak langsung meningkatkan capaian target kinerja program, tetapi tetap penting untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan per urusan pembangunan daerah.
2. Pengalokasian anggaran untuk pemulihan ekonomi daerah
Dampak Pandemi Covid-19 bagi masyarakat, terutama pada sektor ekonomi dan sosial, diperlukan pengalokasian anggaran untuk belanja pemulihan ekonomi daerah. Belanja untuk pemulihan ekonomi daerah diprioritaskan untuk dukungan ekonomi dan perlindungan sosial. Pengalokasian anggaran pada belanja untuk dukungan ekonomi diarahkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan-urusan yang berhubungan langsung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, yaitu urusan UMKM, koperasi, kelautan dan perikanan, Peranian, dan Perdagangan. Sedangkan pengalokasian anggaran pada belanja untuk dukungan perlindungan sosial diarahkan kepada Perangkat Daerah yang berhubungan langsung urusan-urusan pembangunan manusia, yaitu urusan kebudayaan dan pariwisata, sosial, kesehatan, dan pendidikan.

F. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan dokumen LKjIP Kota Salatiga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kota Salatiga tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja;
2. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah
3. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 selengkapnya disajikan sebagai berikut:

1. VISI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Salatiga ditetapkan visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) 2017-2022, yaitu:

“SALATIGA HATI BERIMAN yang SMART”.

Pernyataan Visi tersebut memiliki makna yang terkandung berdasarkan masing-masing frase. Visi Kota Salatiga memiliki dua frase, yaitu kata “HATI BERIMAN” dan kata “SMART”. Kata HATI BERIMAN merupakan singkatan dari kata SEHAT, TERTIB, INDAH dan AMAN. Sedangkan kata SMART merupakan singkatan dari SEJAHTERA, MANDIRI dan BERMARTABAT.

Penjelasan yang dimaksud pada masing-masing kata dalam kalimat HATI BERIMAN yang SMART tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penjelasan Makna Visi
"Salatiga HATI BERIMAN yang SMART"

Unsur Visi	Penjelasan
Hati Beriman	Secara harfiah "HATI BERIMAN" mengandung arti "Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan Maha Esa maka setiap penduduk/warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing". "KOTA SALATIGA HATI BERIMAN" mempunyai makna "Terciptanya suasana dan kondisi kehidupan kota/masyarakat salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman, di mana penduduk/warga kotanya adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil –spiritual". (Perda Kotamadya Salatiga No.10 Tahun 1993)
Sejahtera	Mempunyai arti masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, yang dicapai melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan lingkungan
Mandiri	Mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah. Di dalam keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga mengandung arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi, dan hubungan antar pemangku kepentingan
Bermartabat	Bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia

Sumber : RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

Visi pembangunan Kota Salatiga tahun 2017-2022 menuju pada kondisi masyarakat yang mandiri dan sejahtera, memiliki keterkaitan dengan visi RPJMN dalam rangka terwujudnya masyarakat yang mandiri, dan dalam RPJMD Jawa Tengah berkaitan dengan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdikari. Jika disandingkan dengan visi pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Persandingan Visi Kota Salatiga
dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Nasional		Provinsi Jawa Tengah		Kota Salatiga	
RPJPN 2005–2025	RPJMN 2015–2019	RPJPD 2005–2025	RPJMD 2013–2018	RPJPD 2005–2025	RPJMD 2017–2022
Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur	Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera, Dan Lestari	Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari, (Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi)	Salatiga Yang Maju, Demokratis Dan Nyaman	Salatiga Hati Beriman Yang Smart (Sejahtera, Mandiri Dan Bermartaba)

Sumber : RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

2. MISI

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mencapai visi pembangunan Kota Salatiga Tahun 2017-2022 “**Salatiga Hari Beriman yang Smart**” ditetapkan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

- Misi 1** : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
- Misi 2** : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
- Misi 3** : Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah
- Misi 4** : Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan
- Misi 5** : Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota
- Misi 6** : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro
- Misi 7** : Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak
- Misi 8** : Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan

Misi 9 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Keterkaitan antar unsur Visi RPJMD Kota Salatiga tahun 2017-2022 ke dalam masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Keterkaitan antar unsur Visi RPJMD Kota Salatiga tahun 2017-2022 ke dalam masing-masing misi

No	Unsur Visi Salatiga HATI BERIMAN yang SMART	Misi RPJMD Kota Salatiga 2017-2022
A.	Frase Sehat	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
B.	Frase Tertib dan Aman	3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah.
C.	Frase Bersih dan Indah	4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan.
		5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota.
D.	Frase Mandiri	6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro
		7. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak
E.	Frase Sejahtera	8. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan
F.	Frase Bermartabat	9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)

Sumber : RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

3. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam Tujuan dan Sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi. Rumusan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya

Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat	1	Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat
2	Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga	1	Meningkatnya aktivitas seni gelar karya budaya dan kelestarian warisan budaya
3	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	1	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	1	Meningkatnya angka keselamatan ibu dan anak
		2	Menurunnya penyakit menular dan tidak menular
		3	Terkendalnya pertumbuhan penduduk

Misi 3 : Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah

Tujuan		Sasaran	
1	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	1	Meningkatkannya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif

Misi 4 : Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan

Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	1	Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi
		2	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Tujuan		Sasaran	
2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Drainase, pengairan dan saluran pembuangan limbah	1	Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana drainase dan pengairan serta pembuangan air limbah
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		2	Penyediaan dan optimalisasi sarana transportasi massal yang berkualitas dan ramah lingkungan

Misi 5 : Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota

Tujuan		Sasaran	
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.	1	Meningkatnya pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat

Misi 6 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro

Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	1	Meningkatnya kuantitas dan daya saing UMKM, koperasi dan Industri
		2	Meningkatnya kinerja perdagangan
		3	Meningkatnya kunjungan wisata pada berbagai destinasi unggulan
		4	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat
		5	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Misi 7 : Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan

Tujuan		Sasaran	
1	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.	1	Meningkatnya realisasi investasi
		2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah

Misi 8 : Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak

Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.	1	Meningkatnya kualitas penanganan PMKS
		2	Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman
2	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.	1	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, Kesetaraan dan keberdayaan perempuan

Misi 9 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik
		2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
		3	Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur sipil negara (ASN)
		4	Meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah

B. ARAH KEBIJAKAN

Pemerintah Kota Salatiga dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2017-2022 dengan efektif dan efisien tetap memperhatikan keselarasan dan sinergitas pembangunan dimana untuk mewujudkan keselarasan dan sinergitas pembangunan tersebut perlu untuk mengkaji dan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Salatiga Tahun 2010-2030.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan arah kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Meskipun Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung pada tahun 2022 namun cenderung turun maka pemerintah Kota Salatiga perlu merubah arah kebijakan ekonomi daerah dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional. Namun demikian Kota Salatiga tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan tetap memperhatikan dinamika, potensi dan kondisi serta permasalahan yang timbul di daerah.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. Mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Arah

kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan tata pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pertumbuhan ekonomi melemah sampai dengan akhir tahun 2020 dan mulai menguat pada tahun 2021 dengan realisasi 3,3 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2022 ditargetkan 1% - 5,45%. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa investasi pada Triwulan I tahun 2022 sudah mencapai 169.846 (ribu rupiah) dari target 314.749 (ribu rupiah) pada akhir tahun untuk penanaman modal asing. Sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri baru tercapai 25.737 (ribu rupiah) dari target 166.578 (ribu rupiah) pada akhir tahun 2022. Diharapkan dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk proses pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Kota Salatiga sehingga aktifitas masyarakat dapat dimulai kembali dan roda perekonomian dapat berputar yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat pulih kembali.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan propinsi dan berdasarkan tahapan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 serta dalam rangka mengatasi penanggulangan dampak COVID-19 untuk memulihkan kondisi ekonomi, reformasi sosial, menanggulangi kemiskinan, dan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan triwulan II, maka Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga tahun 2022 ditujukan untuk **“Integrasi Pembangunan Menuju Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”**. Merupakan tema pembangunan yang menjadi Ultimate Goal dari penyelenggaraan pembangunan di tahun akhir perencanaan pembangunan di Kota Salatiga. Pembangunan difokuskan pada optimalisasi dan sinergitas lintas sektor dalam pencapaian sembilan misi pembangunan di Kota Salatiga. Dengan prioritas pembangunan pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pemantapan dan pemerataan pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Pemantapan dan pemerataan infrastruktur terutama mengarah pada penyelesaian penataan wajah kota dan penyediaan transportasi massal yang terintegrasi;
3. Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, industri kecil dan menengah serta penataan pasar;
4. Pemantapan program-program penanggulangan kemiskinan;
5. Pemerataan kualitas pelayanan publik pada seluruh unit pelayanan publik pemerintah;
6. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
7. Pengembangan *Smart City* di berbagai jenis pelayanan.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Berikut tabel Perjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2022:

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Kota Salatiga Tahun 2022

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022
1	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,95
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,99
2	Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga	Cakupan seni dan Cagar budaya yang dilestarikan	%	58
3	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peringkat dalam Porda	Ranking	5
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,40
		Laju Pertumbuhan penduduk	%	1,32
5	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Indeks/Angka Kriminalitas	Indeks	0,06

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022
6	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan baik	%	75
7	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Drainase, pengairan dan saluran pembuangan limbah	Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	%	100,00
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	85
9	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan.	%	3,99
10	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,45
		Produk Domestik Regional Bruto per kapita	Ribu Rupiah	73.893
11	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	3
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,73
12	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Penduduk Miskin	%	4,70
		Pola Pangan Harapan	Skor	92,20

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022
13	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.	Capaian Kota Layak Anak	Skor	680,00
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	84,20
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97,20
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,57
14	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Indeks	65,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022 (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	659.853.888.272
2	Program Pengelolaan Pendidikan	44.159.259.440
3	Program Pengembangan Kurikulum	5.240.000
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.842.577.000
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	121.088.972
6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	139.459.000
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	39.544.680.713
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	826.000.000
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	262.238.000
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.644.860.000
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.854.722.000
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.011.995.337
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.137.976.000
14	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	8.814.832.500



NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022 (Rp)
15	Program Penataan Bangunan Gedung	3.411.755.000
16	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	11.361.195.788
17	Program Penyelenggaraan Jalan	25.883.389.507
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.000.000.000
19	Program Pengembangan Perumahan	1.332.647.907
20	Program Kawasan Permukiman	2.775.242.405
21	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6.244.385.319
22	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	694.682.700
23	Program Penanggulangan Bencana	398.415.978
24	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	353.624.000
25	Program Pemberdayaan Sosial	554.660.000
26	Program Rehabilitasi Sosial	818.571.400
27	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.337.959.200
28	Program Penanganan Bencana	207.445.000
29	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	89.826.000
30	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.582.485.382
31	Program Penempatan Tenaga Kerja	90.174.000
32	Program Hubungan Industrial	69.548.000
33	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	212.981.000
34	Program Perlindungan Perempuan	103.790.000
35	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	708.900.000
36	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	163.128.000
37	Program Perlindungan Khusus Anak	107.692.600
38	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	892.736.300
39	Program Penanganan Kerawanan Pangan	35.025.800
40	Program Pengawasan Keamanan Pangan	56.432.100
41	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.148.360.700
42	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	15.718.900
43	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	442.281.200
44	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	102.702.000
45	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.261.948.275



NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022 (Rp)
46	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	5.725.091.634
47	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	174.828.900
48	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	83.324.000
49	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	126.313.900
50	Program Pengelolaan Persampahan	1.433.996.850
51	Program Pendaftaran Penduduk	949.915.400
52	Program Pencatatan Sipil	37.529.000
53	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	34.019.000
54	Program Pengendalian Penduduk	311.645.000
55	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.456.001.800
56	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	990.263.100
57	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.151.526.200
58	Program Informasi dan Komunikasi Publik	948.305.000
59	Program Aplikasi Informatika	3.218.781.800
60	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	48.919.800
61	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	29.559.800
62	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	277.743.000
63	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	95.593.000
64	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	377.705.400
65	Program Pengembangan UMKM	546.695.600
66	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	71.500.000
67	Program Promosi Penanaman Modal	339.500.000
68	Program Pelayanan Penanaman Modal	188.415.700
69	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	447.055.000
70	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.069.010.000
71	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.833.051.800
72	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	710.674.900



NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022 (Rp)
73	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	81.735.300
74	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	345.806.400
75	Program Pengembangan Kebudayaan	608.276.100
76	Program Pembinaan Sejarah	184.535.300
77	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	185.000.000
78	Program Pembinaan Perpustakaan	1.058.710.750
79	Program Pengelolaan Arsip	427.622.200
80	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	576.519.800
81	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	44.499.900
82	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.627.613.550
83	Program Pemasaran Pariwisata	245.766.800
84	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	603.983.100
85	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.348.605.150
86	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	738.169.000
87	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	291.085.200
88	Program Penyuluhan Pertanian	162.908.000
89	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	8.220.000
90	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.584.580.870
91	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	410.732.000
92	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	249.151.800
93	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	9.578.900
94	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	10.348.696.737
95	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industrial Nasional	16.269.000
96	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0
97	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.549.041.500
98	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.542.140.400
99	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	23.088.338.300
100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.537.832.200



NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022 (Rp)
101	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.294.781.200
102	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.934.127.800
103	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.435.084.000
104	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	897.957.900
105	Program Kepegawaian Daerah	1.721.544.100
106	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.896.923.598
107	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	118.558.600
108	Program Penyelenggaraan Pengawasan	52.351.900
109	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	194.404.000
110	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	122.758.000
111	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	36.654.274.044
112	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	239.705.000
113	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.375.000
114	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	157.704.400
115	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	757.755.964
116	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.306.353.700
117	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	336.327.000
118	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	748.766.500
JUMLAH		1.006.110.658.242

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban secara tepat, jelas dan terukur. Untuk itu Pemerintah Kota Salatiga menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2022 disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2022 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Salatiga (PK Perubahan Kota Salatiga) Tahun 2022.

Laporan Kinerja dilengkapi dengan Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Salatiga dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya capaian kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya capaian kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk mempermudah dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan dalam penilaian kinerja pemerintah, digunakan kriteria penilaian dengan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Ordinal Pencapaian Indikator Tujuan/Sasaran Strategis

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	> 100%	Sangat Baik
2	75% - 100%	Baik
3	55% - 74%	Cukup
4	< 55%	Kurang

Capaian kinerja per Tujuan/Sasaran Strategis pada tahun 2022 dilakukan analisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sedangkan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya digunakan rumus sebagai mana terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E : Efisiensi
PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i
CKi : Capaian Keluaran i

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Hasil analisa capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis (IKU) Pemerintah Kota Salatiga tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Merata Bagi Seluruh Masyarakat.

Tujuan/Sasaran Strategis 1 (satu) Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 1 (satu) adalah Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan NonFormal Bagi Masyarakat dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah PAUD
2. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI
3. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 1 (satu) adalah:

- Dinas Pendidikan

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah tidak terlepas dari tercapainya target kinerja Indikator Kinerja Daerah pada sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat.

Perhitungan dan Pengolahan data untuk mengukur realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah dilakukan oleh BPS.

Berikut Analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah.

1.1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Capaian kinerja pada IKU Rata-rata Lama Sekolah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	9,85	9,87	9,89	9,91	9,93	9,95
Realisasi							
Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	9,82	10,15	10,4	10,42	10,66	10,95
Capaian Kinerja							
Rata Rata Lama Sekolah	%	99,70	102,84	105,16	105,15	107,35	110,05
Kategori		Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : BPS

Indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2022 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Akhir RPJMD Tahun 2022 adalah sebesar 9,95 tahun dan berdasarkan data BPS terealisasi sebesar 10,95 tahun, sehingga capaian kinerja indikator Rata-rata Lama Sekolah tahun 2022 adalah 110,05% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2017 sebesar 9,82 tahun, tahun 2018 sebesar 10,15 tahun, tahun 2019 sebesar 10,4 tahun, tahun 2020 sebesar 10,42 tahun, tahun 2021 sebesar 10,66 tahun, dan akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 10,95 yang artinya realisasi kinerja untuk indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah sebesar 9,95, sedangkan tahun 2022 tercapai realisasi sebesar 10,95 tahun. Dengan demikian target akhir RPJMD untuk indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 110,05%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional .

Berdasarkan data BPS, Rata-rata Lama Sekolah penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas tahun 2022 adalah 8,69 tahun. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga tahun 2022 adalah 10,95 tahun. Dengan demikian Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga lebih tinggi daripada Rata-rata Lama Sekolah penduduk Indonesia secara nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pendidikan menjadi salah satu aspek untuk mengukur capaian kinerja pada indikator ini. Indikator kinerja rata-rata lama sekolah dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Keberhasilan pencapaian indikator angka partisipasi dipengaruhi oleh kemudahan akses dan kualitas pendidikan serta menurunnya beban biaya yang ditanggung masyarakat untuk menyekolahkan anak dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Kesetaraan serta Beasiswa Siswa Kurang Mampu.

Hal-hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah adalah :

1. Memberikan peluang yang luas pada pendidikan Non Formal seperti Kejar Paket;
2. Pemberian Beasiswa bagi siswa berprestasi;
3. Pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu;
4. Pemberian penghargaan bagi siswa yang memiliki prestasi melalui kegiatan lomba bidang pendidikan.
5. Meningkatkan pelayanan anak berkebutuhan khusus.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel

berikut:

Tabel 3.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator
Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Rata-rata Lama Sekolah	110,05	Pengelolaan Pendidikan	44.159.259.440	42.165.524.691	95,49%	99,13%
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.842.577.000	18.051.963.585	86,61%	99,21%
		Pengendalian Perizinan Pendidikan	121.088.972	97.744.800	80,72%	99,27%
Efisiensi						99,16%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan dengan anggaran Rp44.159.259.440,- dan terealisasi Rp42.165.524.691,- atau sebesar 95,49%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,13%.
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran Rp20.842.577.000,- dan terealisasi Rp18.051.963.585,- atau sebesar 86,61%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,21%.
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan anggaran Rp121.088.972,- dan terealisasi Rp97.744.800,- atau sebesar 80,72%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,27%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah sebesar 99,16%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah antara lain:

1. Program Pengelolaan Pendidikan terdiri dari 4 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan pada program ini adalah meningkatnya PAUD *Holistic integrative* dan penyelenggaraan PAUD sesuai standar nasional, serta meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata dan terjangkau.
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari 1 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan dari program ini adalah meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAUD, SD/MI, SMP/MTs.

3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan terdiri dari 1 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan dari program ini adalah meningkatnya akses pendidikan non formal yang bermutu, merata dan terjangkau.

1.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa mendatang. Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Harapan Lama Sekolah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,98	14,98	14,98	14,99	14,99	14,99
Realisasi							
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,98	14,99	15	15,41	15,42	15,43
Capaian Kinerja							
Harapan Lama Sekolah	%	100	100,07	100,13	102,80	102,87	102,94
Kategori		Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : BPS

Indikator kinerja Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah tahun 2022 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2022 sebesar 14,99 tahun dan berdasarkan data BPS terealisasi sebesar 15,43 tahun, sehingga capaian kinerja tahun 2022 adalah 102,94% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2017 sebesar 14,98 tahun, tahun 2018 sebesar 14,99 tahun, tahun 2019 sebesar 15 tahun, tahun 2020 sebesar 15,41 tahun, realisasi tahun 2021 sebesar 15,42 tahun, dan realisasi tahun 2022 sebesar

15,43 tahun, yang artinya realisasi kinerja untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (RLS) terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebesar 14,99 tahun, sedangkan realisasi kinerja tahun 2022 telah mencapai 15,43 tahun. Dengan demikian target RPJMD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 102,94%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Berdasarkan data BPS, Harapan lama Sekolah (HLS) Penduduk Indonesia sebesar 13,10 tahun. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan lamanya waktu menamatkan Pendidikan setingkat Diploma I. Sedangkan Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga adalah 15,43 tahun. Dengan demikian Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga lebih tinggi daripada Harapan Lama Sekolah Penduduk Indonesia secara nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Harapan lama sekolah berpengaruh terhadap investasi pengembangan sumber daya manusia. Terdapat empat kriteria untuk investasi pengembangan sumber daya manusia yaitu:

1. Kebutuhan tenaga kerja terampil dalam lapangan kejuruan dan teknologi;
2. Perluasan pendidikan dasar yang dipandang memiliki tingkat keuntungan/manfaat (*rate of return*) yang lebih tinggi sehubungan dengan rendahnya biaya;
3. Pengembangan sektor pedesaan sehingga memperlihatkan peranan pendidikan masal untuk meningkatkan produktivitas sektor pedesaan;
4. Keadilan dan pemerataan yang menunjukkan pentingnya distribusi kesempatan memperoleh pendidikan dan bentuk-bentuk pengembangan SDM lain baik secara geografis, sosial, dan ekonomis.

Keberhasilan pencapaian indikator angka partisipasi dipengaruhi oleh kemudahan akses dan kualitas pendidikan serta menurunnya beban biaya yang ditanggung

masyarakat untuk menyekolahkan anak dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Kesetaraan serta Beasiswa Siswa Kurang Mampu.

Di Kota Salatiga Angka Partisipasi Sekolah PAUD 89,61%, angka partisipasi SD/MI sebesar 99,23%, angka partisipasi sekolah SMP/MTs 90,56%, angka melek huruf 99,63%, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,014% dan angka putus sekolah SMP/MTs 0,07%.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Harapan Lama Sekolah	102,94	Pengelolaan Pendidikan	44.159.259.440	42.165.524.691	95,49%	99,07%
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.842.577.000	18.051.963.585	86,61%	99,16%
		Pengendalian Perizinan Pendidikan	121.088.972	97.744.800	80,72%	99,22%
Efisiensi						99,10%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan dengan anggaran Rp44.159.259.440,- dan terealisasi Rp42.165.524.691,- atau sebesar 95,49%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,07%.
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran Rp20.842.577.000,- dan terealisasi Rp18.051.963.585,- atau sebesar 86,61%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,16%.
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan anggaran Rp121.088.972,- dan terealisasi Rp97.744.800,- atau sebesar 80,72%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,22%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah sebesar 99,10%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah antara lain:

1. Program Pengelolaan Pendidikan terdiri dari 4 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan pada program ini adalah meningkatnya PAUD *Holistic integrative* dan penyelenggaraan PAUD sesuai standar nasional, serta meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata dan terjangkau.
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari 1 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan dari program ini adalah meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAUD, SD/MI, SMP/MTs.
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan terdiri dari 1 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan dari program ini adalah meningkatnya akses pendidikan non formal yang bermutu, merata dan terjangkau.

2. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Apresiasi Pada Seni Dan Karya Budaya Serta Melestarikan Warisan Budaya Kota Salatiga.

Tujuan/Sasaran Strategis 2 (dua) meningkatkan Apresiasi Pada Seni dan Karya Budaya serta Melestarikan Warisan Budaya Kota Salatiga hanya terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan. Pada tahun 2022 ini, capaian kinerja Pemerintah Kota Salatiga masih diprioritaskan pada meningkatkan apresiasi dan pembinaan (hanya mencatat, melegalkan dan membina) belum diarahkan pada pelestarian seni dan budaya.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 2 (satu) adalah Meningkatnya aktivitas seni gelar karya budaya dan kelestarian warisan budaya dengan variabel indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

1. Persentase kelompok seni dan komunitas budaya yang dibina
2. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 2 (dua) adalah:

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk menghitung realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Utama Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan} = \frac{\text{Capaian persentase Seni dan Komunitas Budaya yang dibina} + \text{Capaian Persentase cagar budaya yang dilestarikan}}{2}$$

Dari rumus tersebut diatas maka realisasi kinerja pada indikator kinerja Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2022 sebesar 118,53%. Realisasi tersebut dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan} = \frac{156,25 + 224,12}{2} = 190,17\%$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator kinerja Utama (IKU) Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang dilestarikan:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan	%	38	42	46	50	54	58
Realisasi							
Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan	%	38,95	57,8	73,23	88,97	129,55	190,17
Capaian Kinerja							
Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan	%	102,5	137,63	159,19	177,94	239,91	327,88
Kategori		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Indikator kinerja cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan tahun 2022 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2022 sebesar 58% dan terealisasi sebesar 190,17%, sehingga capaian indikator kinerja Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2022 adalah 327,88% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja untuk cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2017 sebesar 38,95%, tahun 2018

sebesar 57,8%, tahun 2019 sebesar 73,23%, tahun 2020 sebesar 88,97%, tahun 2021 sebesar 129,55% sedangkan tahun 2022 sebesar 190,17% yang artinya realisasi dan capaian kinerja untuk indikator cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD adalah sebesar 58%, sedangkan pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 190,17% sehingga target akhir RPJMD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 327,88%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan tercapainya target dari indikator ini adalah:

1. Pengembangan gelar seni budaya yang mengedapankan kearifan lokal.
2. Terlaksananya kajian pelestarian warisan budaya.
3. Peran serta dan kepedulian masyarakat, pelaku budaya, akademisi terhadap seni dan budaya daerah.
4. Pengadaan sarana dan prasarana untuk pementasan yang bersifat nasional/internasional.
5. Pemanfaatan media sosial seperti instgram, youtube dan facebook untuk menginformasikan pengembangan gelar seni budaya.
6. Pelaksanaan pembinaan dan pelestarian cagar budaya dan situs secara berkala melalui kerjasama dengan stakeholder dan instansi.
7. Banyaknya penggiat cagar budaya dan sejarahwan di Kota Salatiga.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja
Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan	327,88	Pengembangan Kebudayaan	608.276.100	607.976.100	99,95%	99,70%
		Pembinaan Sejarah	184.535.300	182.044.470	98,65%	99,70%
		Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	185.000.000	183.948.950	99,43%	99,70%
Efisiensi						99,70%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan yaitu:

1. Program Pengembangan Kebudayaan dengan anggaran Rp608.276.100,- dan terealisasi Rp607.976.100,- atau sebesar 99,95%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,70%.
2. Program Pembinaan Sejarah dengan anggaran Rp184.535.300,- dan terealisasi Rp182.044.470,- atau sebesar 98,65%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,70%.
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan anggaran Rp185.000.000,- dan terealisasi Rp183.948.950,- atau sebesar 99,70%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,70%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 99,70%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Program Pengembangan Kebudayaan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pelestarian kesenian tradisional, dan pembinaan lembaga adat.
2. Program Pembinaan Sejarah terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembinaan sejarah lokal.
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penetapan cagar budaya.

3. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga.

Tujuan/Sasaran Strategis 3 (tiga) Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga hanya terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Peringkat dalam PORDA.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 3 (tiga) adalah Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

1. Persentase Pemuda Berwirausaha
2. Persentase Atlet Berprestasi

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 3 (tiga) adalah:

- Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Realisasi IKU Peringkat dalam Porda dihitung berdasarkan capaian ranking Pemerintah Kota Salatiga dalam Porda yang dilaksanakan 4 tahun sekali.

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Peringkat dalam PORDA:

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Peringkat Dalam Porda

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Peringkat dalam PORDA	Ranking	7	6	6	5	5	5
Realisasi							
Peringkat dalam PORDA	Ranking	7	6	6	6	6	6
Capaian Kinerja							
Peringkat dalam PORDA	%	100	100	100	80	80	80
Kategori		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Indikator kinerja peringkat dalam PORDA merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) peringkat dalam PORDA tahun 2022 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target tahun 2022 peringkat dalam PORDA adalah peringkat 5 dan terealisasi peringkat 6 sehingga capaian kinerja 80% dengan kategori Baik. Data realisasi ini adalah berdasarkan capaian pada PORDA terakhir yang diikuti Kota Salatiga pada tahun 2018 di Surakarta dari 35 kabupaten/kota di Jateng. Hal ini disebabkan PORDA diselenggarakan setiap 4 tahun sekali.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Bila dibandingkan dengan tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 Kota Salatiga berada pada posisi 6 besar, maka pada tahun 2022 belum mengalami peningkatan karena PORDA diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, sehingga capaian tahun 2022 masih menggunakan capaian tahun 2018.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD adalah Kota Salatiga pada posisi 5 besar PORDA Jawa Tengah, sementara pada tahun 2022 posisi Kota Salatiga masih pada peringkat 6, jadi target dalam RPJMD masih belum tercapai pada tahun ini dengan tingkat kemajuan sebesar 80%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional dalam indikator kinerja peringkat dalam PORDA.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Untuk mempersiapkan diri pada pelaksanaan PORDA yang akan datang, Pemerintah Kota Salatiga melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembentukan Kelompok Belajar Olahraga (KBO) dan Pusat Pengembangan Latihan Olahraga Daerah (PPOPD).
2. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan.
3. Pembinaan manajemen organisasi olahraga.
4. Penyelenggaraan kompetisi olahraga.
5. Pengadaan peralatan cabang olahraga.
6. Pembibitan atlet sejak usia dini sehingga menghasilkan bibit atlet profesional.
7. Membangun sinergi yang baik antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan induk cabang olahraga dan KONI.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja
Peringkat Dalam PORDA

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Peringkat Dalam PORDA	80	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.069.010.000	1.033.156.000	96,65%	98,79%
		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.833.051.800	9.729.661.650	98,95%	98,76%
		Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	710.674.900	706.630.900	99,43%	98,76%
Efisiensi						98,77%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan yaitu:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan anggaran Rp1.069.010.000,- dan terealisasi Rp1.033.156.000,- atau sebesar 96,65%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,79%.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan anggaran Rp9.833.051.800,- dan terealisasi Rp9.729.661.650,- atau sebesar 98,95%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,76%.
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan anggaran Rp 710.674.900,- dan terealisasi Rp 706.630.900,- atau sebesar 99,43%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,76%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Peringkat Dalam PORDA sebesar 98,77%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya mendukung indikator ini program/kegiatan yang mendukung antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, penyelenggaraan kejuaran olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi,

pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

4. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.

Tujuan/Sasaran Strategis 4 (empat) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Angka Usia Harapan Hidup dan Laju Pertumbuhan Penduduk.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 4 (empat) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Usia Harapan Hidup adalah:

1. Meningkatnya Angka Keselamatan Ibu dan Anak dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
 - a. Angka Kematian Ibu;
 - b. Angka Kematian Bayi;
 - c. Prevalensi Balita Gizi Buruk.
2. Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
 - a. Success Rate TB Kota Salatiga;
 - b. Prevalansi Hipertensi Penduduk Usia diatas 18 tahun.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

- Dinas Kesehatan

Berikut analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Usia Harapan Hidup.

4.1. Angka Usia Harapan Hidup

Definisi Usia Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Angka Usia Harapan Hidup merupakan hasil pengolahan data dan perhitungan yang dilaksanakan oleh BPS.

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Usia Harapan Hidup:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Angka Usia Harapan Hidup

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	76,96	77,05	77,13	77,22	77,31	77,40
Realisasi							
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	76,87	76,98	77,11	77,40	77,55	77,72
Capaian Kinerja							
Angka Usia Harapan Hidup	%	99,88	99,91	99,97	100,23	100,31	100,41
Kategori		Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : BPS

Indikator kinerja angka usia harapan hidup merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Usia Harapan Hidup tahun 2022 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisa sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target tahun 2022 angka usia harapan hidup sebesar 77,40 tahun dan berdasarkan data BPS terealisasi 77,72 tahun. sehingga capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup tahun 2022 sebesar 100,41% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi indikator kinerja Usia Harapan Hidup pada tahun 2017 adalah 76,87 tahun, tahun 2018 adalah 76,98 tahun, tahun 2019 adalah 77,11 tahun, tahun 2020 adalah 77,40 tahun, realisasi kinerja tahun 2021 adalah 77,55 tahun, dan realisasi kinerja tahun 2022 adalah 77,72 tahun. Dengan demikian realisasi dan capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD untuk indikator kinerja Usia Harapan Hidup adalah 77,40 tahun, dan pada tahun 2022 terealisasi 77,72 tahun. Dengan demikian target akhir RPJMD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 100,41%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Berdasarkan data BPS tahun 2022, usia harapan hidup di Indonesia mencapai 71,85 tahun, sedangkan di Kota Salatiga Usia Harapan Hidup sudah mencapai 77,72 tahun, dengan demikian Usia Harapan Hidup penduduk Kota Salatiga lebih tinggi daripada Usia Harapan Hidup Penduduk Indonesia.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan tercapainya target dari indikator ini adalah:

1. Keberhasilan manajemen resiko tinggi di masyarakat melalui kelompok sayang ibu dan pendampingan ibu hamil resiko tinggi.
2. Peningkatan upaya promosi kesehatan pada penyakit menular dan tidak menular.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Pengembangan pola hidup sehat dengan penerapan GERMAS.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja
Angka Usia Harapan Hidup

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Usia Harapan Hidup	100,41	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	39.944.680.713	36.430.335.653	91,20%	99,09%
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	826.000.000	673.409.788	81,53%	99,19%
		Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	262.238.000	175.885.500	67,07%	99,33%
		Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	1.644.860.000	1.619.707.808	98,47%	99,02%
Efisiensi						99,09%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 4 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup yaitu:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp39.944.680.713,- dan terealisasi Rp36.430.335.653,- atau sebesar 91,20%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,09%.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan anggaran Rp 826.000.000,- dan terealisasi Rp 673.409.788,- atau sebesar 81,53%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,19%.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan anggaran Rp262.238.000,- dan terealisasi Rp175.885.500,- atau sebesar 67,07%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,33%.
4. Program Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan anggaran Rp1.644.860.000,- dan terealisasi Rp1.619.707.808,- atau sebesar 98,47%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.

Berdasarkan perhitungan di atas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup sebesar 99,09%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Angka Usia Harapan Hidup, di dukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 4 kegiatan pada Dinas Kesehatan dan 1 kegiatan pada RSUD dengan sasaran kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kota.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) penerbitan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
4. Program Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral tingkat Kota dan pelaksanaan kesehatan dalam rangka promotif preventif tingkat Kota.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 4 (empat) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju Pertumbuhan Penduduk adalah terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) TFR (*Total Fertility Rate*)

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

- DP3APPKB

4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Definisi Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Angka Laju Pertumbuhan merupakan hasil pengolahan data dan perhitungan yang dilaksanakan oleh BPS.

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju Pertumbuhan Penduduk:

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,42	1,4	1,38	1,36	1,34	1,32
Realisasi							
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,38	1,45	1,31	1,18	0,83	0,80

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Capaian Kinerja							
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	102,82	96,43	105,07	113,24	138,06	139,39
Kategori		Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : DP3APPKB

Indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2022 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisa sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target tahun 2022 indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,32% dan terealisasi 0,80%, sehingga capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga tahun 2022 sebesar 139,39% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2017 sebesar 1,38%, tahun 2018 sebesar 1,45%, tahun 2019 sebesar 1,31%, tahun tahun 2020 1,18%, tahun 2021 sebesar 0,83%, dan tahun 2022 sebesar 0,80%, yang artinya realisasi kinerja terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk adalah sebesar 1,32%, dan pada tahun 2022 terealisasi 0,80%, dengan demikian target RPJMD untuk indikator Laju Pertumbuhan Penduduk telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 139,39%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Berdasarkan data BPS, Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia tahun 2022 adalah sebesar 1,17%. Dengan demikian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga masih lebih rendah dibanding Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk antara lain Kelahiran (natalitas), Kematian (mortalitas), Perpindahan (migrasi). DP3PPKB Kota Salatiga hanya bisa menjalankan pada pengaturan jumlah kelahiran melalui program KB dan pelayanan KB, dimana jumlah kelahiran tahun 2022 sebanyak 2.168 sedangkan peserta KB baru hanya 585, sehingga masih ada ibu melahirkan yang belum mengikuti program KB. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator antara lain:

1. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan pemasangan kontrasepsi selama masa pandemi seperti APD baik bagi pemberi pelayanan KB maupun akseptor KB.
2. Melaksanakan pelayanan KB dengan memperhatikan protokol kesehatan terutama untuk KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).
3. Peningkatan kualitas tenaga pemberi pelayanan KB di masa pandemi melalui pelatihan CTU.
4. Meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi bagi kelompok kegiatan dan penyuluh keluarga berencana dengan penyediaan genre kit, BKB kit, BKL kit, dan KIE kit.
5. Pemberian penghargaan bagi akseptor Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW).
6. Melakukan monitoring program KKBKP oleh PLKB di tingkat kelurahan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas IMP (Institusi Masyarakat Pesedaan).

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Laju Pertumbuhan Penduduk	139,39	Pengendalian Penduduk	64.434.700	56.975.400	88,42%	99,37%
		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.526.756.900	2.171.163.151	61,56%	99,56%

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	82.605.000	81.552.000	98,73%	99,29%
Efisiensi						99,55%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk yaitu:

1. Program Pengendalian Penduduk dengan anggaran Rp.64.434.700,- dan terealisasi Rp.56.975.400,- atau sebesar 88,42%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,37%.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan anggaran Rp.3.526.756.900,- dan terealisasi Rp.2.171.163.151,- atau sebesar 61,56%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,56%.
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan anggaran Rp.82.605.000,- dan terealisasi Rp.81.552.000,- atau sebesar 98,73%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,29%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 99,55%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Laju Pertumbuhan Penduduk, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengendalian dan KB, pendayagunaan tenaga penyuluh dan petugas lapangan KB, pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organissai kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB.

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan dan peningkatan organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga.

5. Tujuan/Sasaran Strategis: Menciptakan Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Tenang, Tertib Dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan.

Tujuan/Sasaran strategis 5 (lima) Menciptakan Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Tenang, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks/Angka Kriminalitas.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 5 (lima) adalah Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Serta Wilayah Yang Kondusif dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 5 (lima) adalah:
 - Satpol PP
2. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba
Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 5 (lima) adalah:
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Data perkembangan tindak kriminal tahun 2017-2022 tersaji sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14
Data Perkembangan Tindak Kriminal Tahun 2017 - 2022

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Tindak kriminal	182	130	163	110	66	61

Sumber : Badan Kesbangpol

Data perkembangan tindak kriminal di atas digunakan untuk menghitung Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tujuan/Sasaran strategis 5 (lima) yaitu Indeks/Angka Kriminalitas.

Perhitungan IKU Indeks/Angka Kriminalitas di Kota Salatiga menggunakan definisi Angka Kriminalitas atau Angka Kejahatan per 100 (seratus) orang penduduk.

Untuk menghitung Indeks/Angka Kriminalitas digunakan rumus:

$$\text{Indeks/Angka Kriminalitas} = \frac{\text{Jumlah kejahatan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$

Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks/Angka Kriminalitas Pemerintah Kota Salatiga diperoleh dari perhitungan jumlah tindak kejahatan tahun 2022 sebanyak 61 dibagi jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 200.220 dikalikan seratus.

$$0,030 = \frac{61}{200.220} \times 100$$

Berdasarkan data di atas, berikut tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Angka Kriminalitas:

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks Angka Kriminalitas

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Indeks/Angka Kriminalitas	Skor	0,13	0,12	0,1	0,1	0,07	0,06
Realisasi							
Indeks/Angka Kriminalitas	Skor	0,15	0,067	0,083	0,056	0,033	0,030
Capaian Kinerja							
Indeks/Angka Kriminalitas	%	84,61	144,17	117	144	152,86	150,00
Kategori		Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Badan Kesbangpol

Indikator Indeks/Angka Kriminalitas merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin kecil realisasi semakin baik capaian kerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Indeks/ Angka Kriminalitas tahun 2022 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Indeks/Angka Kriminalitas pada akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 0,06 dan terealisasi sebesar 0,030 sehingga capaian kinerja indikator Indeks/Angka Kriminalitas adalah 150,00% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi kinerja untuk indikator Indeks/Angka Kriminalitas pada tahun 2017 sebesar 0,17, tahun 2018 sebesar 0,067, tahun 2019 sebesar 0,087, tahun 2020 sebesar 0,056, tahun 2021 sebesar 0,033, dan tahun 2022 sebesar 0,030. Dengan demikian realisasi kinerja dan capaian kinerja semakin meningkat.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target realisasi kinerja pada akhir RPJMD adalah sebesar 0,06 sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah 0,030, dengan demikian Pemerintah target akhir RPJMD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 150,00%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Indeks/Angka Kriminalitas.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas adalah:

1. Adanya koordinasi yang intens antara Pemerintah Kota Salatiga dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam wadah kegiatan cipta kondusifitas Kota Salatiga;
2. Adanya pemantauan daerah rawan konflik;
3. Peningkatan pembinaan kepada masyarakat; melalui sosialisasi orientasi kewaspadaan nasional dalam rangka mengantisipasi radikalisme dan terorisme;
4. Fasilitasi dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psiktropika dan zat adiktif lainnya; dan
5. Sosialisasi wawasan kebangsaan guna menumbuhkan rasa nasionalisme pada masyarakat dari pelajar, mahasiswa, pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
6. Operasi gabungan Satpol, TNI dan POLRI untuk penegakan Perda dan Perkada.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja
Indeks Angka Kriminalitas

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indeks/ Angka Kriminalitas	150,00	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	694.682.700	668.381.900	96,21%	99,36%
		Penanggulangan Bencana	398.415.978	236.943.100	59,47%	99,60%
		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	353.624.000	263.238.500	74,44%	99,50%

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
		Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	157.704.400	141.870.750	89,96%	99,40%
		Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	757.755.964	754.512.214	99,57%	99,34%
		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.306.353.700	1.251.273.000	95,78%	99,36%
		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	336.327.000	222.853.250	66,26%	99,56%
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	748.766.500	671.784.900	89,72%	99,40%
	Efisiensi					99,41%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 (program) untuk mendukung capaian indikator Indeks/Angka Kriminalitas pada Satpol PP yaitu:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp694.682.700,- dan terealisasi Rp668.381.900,- atau sebesar 96,21%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,36%.
2. Program Penanggulangan Bencana dengan anggaran Rp398.415.978,- dan terealisasi Rp236.943.100,- atau sebesar 59,47%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,60%.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan anggaran Rp353.624.000,- dan terealisasi Rp263.238.500,- atau sebesar 74,44%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,50%.

Terdapat 5 (program) untuk mendukung capaian indikator Indeks/Angka Kriminalitas pada Badan Kesbangpol yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran Rp 157.704.400,- dan terealisasi Rp 141.870.750,- atau sebesar 89,96%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,40%.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan anggaran Rp

757.755.964,- dan terealisasi Rp 754.512.214,- atau sebesar 99,57%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,34%.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat dengan anggaran Rp1.306.353.700,- dan terealisasi Rp1.251.273.000,- atau sebesar 95,78%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,36%.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan anggaran Rp336.327.000,- dan terealisasi Rp222.853.250,- atau sebesar 66,26%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,56%.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran Rp748.766.500,- dan terealisasi Rp671.784.900,- atau sebesar 89,72%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,40%.

Berdasarkan perhitungan di atas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator Indeks/Angka Kriminalitas sebesar 99,41%.

g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator sasaran ini pada Satpol PP adalah:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda melalui penanganan pelanggaran Perda dan Perwali.
2. Program Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, penataan sistem dasar penanggulangan bencana.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator sasaran ini pada Badan Kesbangpol adalah:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

6. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Dan Infrastruktur Dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata.

Tujuan/Sasaran Strategis 6 (enam) Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Dan Infrastruktur Dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Kawasan Wajah Kota Yang Tertata Dengan Baik.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 6 (enam) adalah:

1. Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi dengan variabel indikator Kinerja Daerah (IKD): Persentase jalan dengan kondisi baik.
2. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 6 (enam) adalah:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase wajah kota yang tertata dengan baik diukur berdasarkan Realisasi Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Berikut target program dan capaian tahun 2022 penataan kawasan wajah kota:

Tabel 3.17
Target Penataan Kawasan Wajah Kota

No	Program	Capaian 2022
1	Jl. Diponegoro - Fatmawati	100%
2	Jl. Jenderal Sudirman	0%
3	Jl. RW. Monginsidi	100%
4	Jl. Soekarno Hatta	100%
5	Penataan Bunderan Tamansari	0%
6	Lapangan Pancasila dan sekitarnya	100%
7	Jl. Sukowati-Tentara Pelajar	50%
8	Rest Area Tingkir	0%
9	Bantaran Isep-isep	0%
10	Bendung Andong	0%
11	Jl. Brigjend Sudiarto	100%
12	Jl. Hasanudin	100%
13	Jl. A. Yani	50%
14	Jl. Pattimura	100%
15	Jl. Tingkir - Barukan	0%
16	Jl. Kartini	100%
17	Jl. Osa Maliki	100%
18	Jl. Veteran	0%
19	Jl. Pemuda	0%
20	Jl. Muh Yamin	0%

Sumber : DPUPR

Berdasarkan data di atas, dari 20 ruas jalan yang menjadi target baru terealisasi 11 ruas jalan.

Berikut tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik:

Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kawasan Wajah Kota Yang Tertata Dengan Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Kawasan wajah Kota yang tertata dengan baik	%	50	55	60	65	45	75
Realisasi							
Kawasan wajah Kota yang tertata dengan baik	%	15,78	25	35	40	50	50

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Capaian Kinerja							
Kawasan wajah Kota yang tertata dengan baik	%	31,56	45,45	58,33	61,54	111,11	66,67
Kategori		Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	Sangat Baik	Cukup

Sumber : DPUPR

Indikator kawasan wajah kota yang tertata dengan baik merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja indikator kinerja Utama Kawasan Wajah Kota Yang Tertata Dengan Baik tahun 2022 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target indikator Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik tahun 2022 sebesar 75% dan terealisasi sebesar 50% sehingga capaian kinerja indikator Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik adalah 66,67% dengan kategori Cukup.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi tahun 2017 sebesar 15,78%, tahun 2018 sebesar 25%, tahun 2019 sebesar 35%, tahun 2020 sebesar 40%, tahun 2021 sebesar 50% dan realisasi tahun 2022 sebesar 50%. Dengan demikian realisasi dan capaian kinerja untuk indikator persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik hampir selalu mengalami peningkatan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD tahun 2022 adalah sebesar 75% dan pada tahun 2022 baru tercapai 50%, dengan demikian target akhir RPJMD belum tercapai pada tahun 2022 dengan tingkat kemajuan sebesar 66,67%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian realisasi kawasan wajah kota yang tertata dengan baik pada tahun 2022 ini disebabkan penataan wajah kota ini menjadi program prioritas bagi Wali Kota terpilih selain itu ketersediaan anggaran juga mendukung tercapainya target persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Kawasan Wajah Kota Yang Tertata Dengan Baik

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Kawasan wajah Kota yang tertata dengan baik	66,67	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.000.000.000	682.149.750	68,21%	98,98%
		Penataan Bangunan dan Lingkungannya	11.361.195.788	11.102.144.000	97,72%	98,53%
		Penataan Bangunan Gedung	3.411.755.000	3.257.004.500	95,46%	98,57%
		Penyelenggaraan Jalan	25.883.389.507	24.597.001.256	95,03%	98,57%
Efisiensi						98,57%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 4 program untuk mendukung capaian indikator Kawasan Wajah Kota yang tertata dengan Baik yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan anggaran Rp1.000.000.000,- dan terealisasi Rp682.149.750,- atau sebesar 68,21%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,98%.
2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan anggaran Rp11.361.195.788,- dan terealisasi Rp11.102.144.000,- atau sebesar 97,72%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,53%.
3. Program Penataan Bangunan Gedung dengan anggaran Rp3.411.755.000,- dan terealisasi Rp3.257.004.500,- atau sebesar 95,46%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,57%.
4. Program Penyelenggaraan Jalan dengan anggaran Rp25.883.389.507,- dan terealisasi Rp24.597.001.256,- atau sebesar 95,03%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,57%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator Kawasan Wajah Kota yang tertata dengan baik sebesar 98,57%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target indikator Kawasan Wajah Kota yang tertata dengan Baik di dukung oleh Program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan penetapan RTRW, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah.
2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyusunan rencana kebijakan strategi sistem penataan bangunan, penataan bangunan dan pemeliharaan bangunan.
3. Program Penataan Bangunan Gedung terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan.
4. Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyusunan rencana kebijakan pengembangan jaringan jalan, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.

7. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Drainase, Pengairan Dan Saluran Pembuangan Limbah.

Tujuan/Sasaran Strategis 7 (tujuh) Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Drainase, Pengairan Dan Saluran Pembuangan Limbah terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Wilayah Dengan Infrastruktur Kondisi Baik.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 7 (tujuh) adalah Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana drainase dan pengairan serta pembuangan air limbah dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

1. Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik
2. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 7 (tujuh) adalah:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Total panjang drainase di Kota Salatiga adalah 381.719,59 meter. Drainase dengan kondisi baik pada tahun 2022 adalah 387.526,51 meter atau sebesar 101,52%.

Total luas daerah irigasi di Kota Salatiga adalah 372,84 Ha dan irigasi yang berkondisi baik tahun 2022 seluas 382,84 atau sebesar 97,39%.

Total panjang jalan di Kota Salatiga adalah 337,471 km dan jalan yang berkondisi mantap tahun 2022 sepanjang 322,81 km atau sebesar 95,66%.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Wilayah dengan Infrastruktur kondisi baik dihitung dari rata-rata realisasi IKD Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik, Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan persentase jalan dalam kondisi mantap. Berikut rumus perhitungan IKU Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik:

$$\text{Realisasi Kinerja Wilayah dengan Infrastruktur Baik} = \frac{\text{persentase jaringan drainase dalam kondisi baik} + \text{Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik} + \text{Persentase jalan dalam kondisi mantap}}{3}$$

Berdasarkan rumus diatas maka realisasi kinerja IKU Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja Wilayah dengan Infrastruktur Baik} = \frac{101,52 + 97,39 + 95,66}{3} = 98,19$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik:

Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	%	65,22	73,91	82,61	91,30	100	100
Realisasi							
Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	%	65,21	82,6	93,45	94,46	96,21	98,19
Capaian Kinerja							
Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	%	99,98	111,75	113,12	103,46	96,21	98,19
Kategori		Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik

Sumber : DPUPR

Indikator Wilayah dengan kondisi Infrastruktur baik merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja indikator kinerja Utama Wilayah dengan kondisi Infrastruktur baik tahun 2022 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik pada Akhir RPJMD Tahun 2022 adalah 100%. Dan berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Realisasi realisasi tahun 2022 sebesar 98,15%. Berdasarkan hasil realisasi tersebut maka capaian kinerja untuk Wilayah dengan Infrastruktur baik adalah 98,15% dengan kategori Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi kinerja untuk indikator persentase wilayah dengan infrastruktur kondisi baik tahun 2017 adalah 65,21%, tahun 2018 sebesar 82,6%, tahun 2019 sebesar 93,45%, tahun 2020 sebesar 94,46%, tahun 2021 sebesar 96,21% dan tahun 2022 sebesar 98,15%. Dengan demikian persentase realisasi wilayah dengan infrastruktur kondisi baik sampai tahun 2020 selalu meningkat, namun pada tahun 2021 sempat menurun dan pada tahun 2022 dapat meningkat kembali.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator persentase wilayah dengan infrastruktur baik adalah 100%. Sedangkan realisasi tahun 2022 baru mencapai 98,15%. Dengan demikian masih target RPJMD belum tercapai di tahun 2021 dengan tingkat kemajuan 98,15%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Peningkatan realisasi kinerja wilayah dengan infrastruktur kondisi baik terutama terkait dengan masyarakat pengguna sanitasi. Hal tersebut disebabkan antara lain:

1. Banyaknya program pemerintah yang menysasar pada bantuan maupun sanitasi layak;
2. Wilayah kota Salatiga yang berupa dataran tinggi menyebabkan tidak ada genangan pada drainase.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	98,15	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.011.995.337	6.985.990.500	99,63%	98,98%
		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.854.722.000	6.158.997.717	89,85%	99,08%
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.137.976.000	4.635.900.824	90,23%	99,08%
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	8.814.832.500	7.567.225.135	85,85%	99,13%
		Penyelenggaraan Jalan	25.883.389.507	24.597.001.256	95,03%	99,03%
Efisiensi						99,05%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 5 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Wilayah dengan Infrastruktur Baik yaitu:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran Rp7.011.995.337,- dan terealisasi Rp6.985.990.500,- atau sebesar 99,63%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,98%.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan anggaran Rp6.854.722.000,- dan terealisasi Rp6.158.997.717,- atau sebesar 89,85%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,08%.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan anggaran Rp5.137.976.000,- dan terealisasi Rp4.635.900.824,- atau sebesar 90,23%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,08%.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan anggaran Rp8.814.832.500,- dan terealisasi Rp7.567.225.135,- atau sebesar 85,85%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,13%.
5. Program Penyelenggaraan Jalan dengan anggaran Rp25.883.389.507,- dan terealisasi Rp24.597.001.256,- atau

sebesar 95,03%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,03%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Wilayah dengan Infrastruktur Baik sebesar 99,05%.

g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja presentase Wilayah dengan Infrastruktur baik antara lain:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan Pengelolaan SDA dan pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai.
5. Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyusunan rencana kebijakan pengembangan jaringan jalan, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.

8. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan/Sasaran Strategis 8 (delapan) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 1(satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 8 (delapan) adalah:

1. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
 - a. Indeks Pencemaran Air;
 - b. Indeks Pencemaran Udara;
 - c. Indeks Tutupan Lahan.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 1 (satu) adalah:

- Dinas Lingkungan Hidup.

2. Penyediaan dan Optimalisasi Sarana Transportasi massal yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) Persentase Kendaraan angkutan Umum yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 8 (delapan) adalah:

- Dinas Perhubungan.

Nilai IKLH merupakan penggabungan analisis dari 3 indikator yang meliputi Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara, Indeks Tutupan Lahan. Sedangkan Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan merupakan bagian yang mendukung capaian indikator Indeks Pencemaran Udara.

Berikut rumus perhitungan IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021:

$$IKLH = (0,376 \times \text{Realisasi Indeks Pencemaran Air}) + (0,405 \times \text{Realisasi Indeks Pencemaran Udara}) + (0,219 \times \text{Realisasi Indeks Tutupan Lahan})$$

Berdasarkan rumus diatas maka realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKLH} = (0,376 \times 45) + (0,405 \times 84,11) + (0,219 \times 47,28) = 61,34$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup:

Tabel 3.22
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Indeks KLH	Nilai	72	75	78	80	63,51	85
Realisasi							
Indeks KLH	Nilai	56,78	59,78	60,05	60,88	58,65	61,34
Capaian Kinerja							
Indeks KLH	%	78,86	79,70	76,98	76,10	92,35	72,16
Kategori		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Indikator kinerja indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 85 dan terealisasi sebesar 61,34 sehingga capaian kinerja tahun 2022 adalah 72,16% atau dengan kategori Cukup.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja Indeks IKLH Tahun 2017 sebesar 56,78, tahun 2018 sebesar 59,78, tahun 2019 sebesar 60,05, tahun 2020 sebesar 60,88, tahun 2021 sebesar 58,65 dan tahun 2022 sebesar 61,34. Dengan demikian realisasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Salatiga terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2021 dan mengalami penurunan di tahun 2022.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah 85, sedangkan realisasi tahun 2022 baru mencapai 61,34. Dengan demikian target akhir RPJMD masih belum tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan baru mencapai 72,16%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Nilai IKLH nasional mencapai 72,42, sedangkan nilai IKLH Kota Salatiga sebesar 61,34. Dengan demikian Nilai IKLH Kota Salatiga masih berada dibawah nilai IKLH Nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tidak tercapaiannya target indeks kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022, dikarenakan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri kecil maupun besar, sektor perdagangan dan jasa sehingga menimbulkan timbunan sampah, meningkatkan emisi, meningkatkan beban pencemaran air sungai atau badan air penerima serta mengurangi tutupan lahan.

Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Melakukan penambahan RTH untuk mengurangi efek dari pencemaran udara.

2. Mengurangi alih fungsi lahan dengan mematuhi Rencana Tata Ruang/Wilayah.
3. Peningkatan Pengawasan dan pemantauan Lingkungan Hidup sehingga status mutu air, udara dan vegetasi tetap terjaga.
4. Penegakan hukum lingkungan benar-benar digalakkan dengan memberlakukan sanksi bagi kegiatan/usaha yang tidak mematuhi aturan mengenai pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Mengembangkan dan meningkatkan jenis investasi yang ramah lingkungan (green investation), sehingga dapat mengurangi dan mencegah dampak negatif pembangunan terhadap kualitas Lingkungan Hidup.
6. Mengembalikan fungsi sungai sebagai badan air, dengan menegaskan larangan membangun di atas sempadan sungai, serta larangan membuang sampah di sungai.
7. Melakukan uji emisi gas buang bagi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.23
Efisiensi Penggunaan Sumber daya Capaian Indikator Kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indeks KLH	72,16	Perencanaan Lingkungan Hidup	102.702.000	87.949.500	85,64%	98,81%
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.261.948.275	1.139.489.950	90,30%	98,75%
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	5.725.091.634	5.467.448.649	95,50%	98,68%
		Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	174.828.900	43.090.337	24,65%	99,66%
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	83.324.000	49.292.500	59,16%	99,18%
		Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	126.313.900	91.383.200	72,35%	99,00%

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
		Pengelolaan Persampahan	1.933.996.850	1.845.746.030	95,44%	98,68%
		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.151.526.200	2.584.652.846	82,01%	98,86%
Efisiensi						98,75%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 7 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp102.702.000,- dan terealisasi Rp87.949.500,- atau sebesar 85,64%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,81%.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp1.261.948.275,- dan terealisasi Rp1.139.489.950,- atau sebesar 90,30%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,75%.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan anggaran Rp5.725.091.634,- dan terealisasi Rp5.467.448.649,- atau sebesar 95,50%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,68%.
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan anggaran Rp174.828.900,- dan terealisasi Rp43.090.337,- atau sebesar 24,65%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,66%.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan anggaran Rp83.324.000,- dan terealisasi Rp49.292.500,- atau sebesar 59,16%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,18%.
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan anggaran Rp126.313.900,- dan terealisasi Rp91.383.200,- atau sebesar 72,35%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,00%.
7. Program Pengelolaan Persampahan dengan anggaran Rp1.933.996.850,- dan terealisasi Rp1.845.746.030,- atau sebesar 95,44%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,68%.

Terdapat 1 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Dinas Perhubungan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan anggaran Rp3.151.526.200,- dan terealisasi Rp2.584.652.846,- atau sebesar 82,01%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,86%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 98,75%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) terdiri dari 1 kegiatan sasaran kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati.
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengumpulan limbah B3.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
7. Program Pengelolaan Persampahan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan sampah dan pembinaan, pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Dinas

Perhubungan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari 6 kegiatan dengan sasaran kegiatan penetapan rencana induk dan jaringan LLAJ dan penyediaan perlengkapan jalan, Pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/barang antar kota dalam satu daerah, penerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah.

9. Tujuan/Sasaran Strategis: Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

Tujuan/Sasaran strategis 9 (sembilan) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Perkotaan Yang Merata Bagi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup hanya terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase kawasan kumuh perkotaan.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 9 (sembilan) adalah Meningkatnya Pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

1. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
 2. Cakupan ketersediaan rumah layak huni
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 1 (satu) adalah:
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 658/440/2016 tentang Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh, Total luasan Kawasan kumuh Kota Salatiga tingkat kumuh ringan dan sedang adalah 253,66 Ha. Sedangkan realisasi kinerja Pemerintah Kota Salatiga sampai dengan tahun 2022 mencapai 149,19 Ha.

Tabel 3.24
Data Perkembangan Penanganan Kawasan Kumuh
Tahun 2017 - 2022

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Penanganan Kawasan Kumuh	0	67,09 Ha	61,7 Ha	16,78 Ha	1,6 Ha	2,02 Ha

Sumber : Dinas PKP

Indikator Kinerja Utama Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan dihitung dengan rumus:

$$\text{Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan} = \frac{\text{Luas Kawasan Kumuh} - \text{luas Kawasan yang tertangani}}{\text{Luas Kota salatiga}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, realisasi kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan} = \frac{253,66 - 149,19}{5678 \text{ Ha}} \times 100\% = 1,84\%$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan:

Tabel 3.25
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	%	4,43	4,28	4,22	4,15	3,99	3,99
Realisasi							
Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	%	4,38	4,08	2,21	1,90	1,94	1,84
Capaian Kinerja							
Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	%	101,13	104,67	147,63	154,22	151,38	153,88
Kategori		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Dinas PKP

Indikator kinerja indeks Luasan Kawasan Kumuh merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan tahun 2022 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Luasan kawasan kumuh perkotaan akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 3,99% sedangkan realisasi Kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2022 sebesar 1,84% sehingga capaian kinerja yang artinya kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotahun 2022 sebesar 153,88% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi Kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2017 sebesar 4,38%, tahun 2018 sebesar 4,08%, tahun 2019 sebesar 2,21%, tahun 2020 sebesar 1,90%, tahun 2021 sebesar 1,94% dan tahun 2022 sebesar 1,84% yang artinya kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target Luasan kawasan kumuh perkotaan pada akhir RPJMD adalah sebesar 3,99% sedangkan realisasi kinerja tahun 2022 luasan kawasan kumuh perkotaan sudah mencapai 1,84%. Dengan demikian target RPJMD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 153,88%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Target nasional sesuai dengan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dari Kementerian PUPR sebesar 0%, sementara sampai dengan akhir tahun 2022 masih terdapat luasan kawasan kumuh sebesar 1,84% di Kota Salatiga.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan indikator ini dikarenakan:

1. Perbaikan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan
2. Meningkatnya fasilitasi pembangunan sarana prasarana pemukiman berbasis masyarakat.
3. Adanya kerjasama dan peran serta masyarakat yang baik antara Pemerintah Kota Salatiga dengan masyarakat.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.26

Efisiensi Penggunaan Sumber daya Capaian Indikator Kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	153,88	Pengembangan Perumahan	1.332.647.907	1.304.952.384	97,92%	99,36%
		Kawasan Permukiman	2.775.242.405	2.614.839.614	94,22%	99,39%

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
		Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6.244.385.319	5.898.753.919	94,46%	99,39%
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	15.718.900	4.650.550	29,59%	99,81%
		Pengelolaan Izin Membuka Tanah	442.281.200	398.717.940	90,15%	99,41%
	Efisiensi					99,39%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 6 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan yaitu:

1. Program Pengembangan Perumahan dengan anggaran Rp1.332.647.907,- dan terealisasi Rp1.304.952.384,- atau sebesar 97,92%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,36%.
2. Program Kawasan Permukiman dengan anggaran sebesar Rp2.775.242.405,- dan terealisasi Rp2.614.839.614,- atau 94,22%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,39%.
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan anggaran sebesar Rp6.244.385.319,- dan terealisasi sebesar Rp5.898.753.919,- atau 94,46%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,39%.
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan anggaran sebesar Rp15.718.900,- dan terealisasi sebesar Rp4.650.550,- atau 29,59%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,81%.
5. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan anggaran sebesar Rp442.281.200,- dan terealisasi sebesar Rp398.717.940,- atau 90,15%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,41%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Luasan Kawasan Kumuh sebesar 99,39%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase luasan kawasan kumuh antara lain :

1. Program Pengembangan Perumahan terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, pembinaan pengelolaan

- rumah susun umum dan/atau rumah khusus dan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
2. Program Kawasan Permukiman terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 hektar dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 hektar.
 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan PSU Perumahan.
 4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan mediasi penyelesaian sengketa tanah Garapan.
 5. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah dan pengendalian pemanfaatan tanah negara.

10. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk.

Tujuan/Sasaran Strategis 10 (sepuluh) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja Utama (IKU) yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB perkapita.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Strategis 10 (sepuluh) adalah:

1. Meningkatnya kuantitas dan daya saing UMKM, Koperasi dan Industri dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
 - a. Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina;
 - b. Persentase KSP/USP Koperasi Sehat;
 - c. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah.Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran ini adalah:
 - Dinas Dinas Koperasi dan UKM.
 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
2. Meningkatnya Kinerja Perdagangan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran ini adalah:
 - Dinas Perdagangan
3. Meningkatnya kunjungan wisata pada berbagai destinasi unggulan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Jumlah kunjungan wisata.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran ini adalah:

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

4. Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat dengan variabel Indikator Kinerja Daerah:

- a. Produktivitas tanaman pangan utama (Padi dan Jagung);
 - b. Produksi Perikanan Budidaya, Produksi Daging Sapi Potong.
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran ini adalah:

- Dinas Pertanian

5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Persentase Peningkatan swadaya masyarakat.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

- DP3APPKB

10.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Berikut tabel capaian kinerja Indikator kinerja Utama (IKU) Pertumbuhan Ekonomi:

Tabel 3.27
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,27	5,3	5,33	5,37	2,1	5,45
Realisasi							
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,23	5,21	5,90	-1,68	3,33	5,53
Capaian Kinerja							
Pertumbuhan Ekonomi	%	99	98,3	110,69	-31,28	158,57	101,47
Kategori		Baik	Baik	Sangat Baik	Kurang	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : BPS

Indikator kinerja indeks Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2022 sebesar 5,45% dan terealisasi sebesar 5,53%, sehingga capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi sebesar 101,47% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi untuk indikator kinerja Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2017 sebesar 5,23%, tahun 2018 sebesar 5,21%, tahun 2019 sebesar 5,90%, tahun 2020 sebesar -1,68%, tahun 2021 sebesar 3,33% dan tahun 2022 sebesar 5,53% yang artinya realisasi indikator Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kemudian kembali meningkat di tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali akibat pandemi Covid-19 dan meningkat kembali di tahun 2021 dan tahun 2022.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 5,45%, sedangkan realisasi kinerja Tahun 2022 adalah 5,53%. Dengan demikian target RPJMD telah tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan 101,47%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,3%, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,31%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga Tahun 2022 sudah mencapai 5,53%. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab tidak tercapainya target dari indikator ini adalah:

1. Dengan adanya pandemic Covid 19 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga.
2. Tingkat Pengangguran di Kota Salatiga yang cenderung meningkat.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.28
Efisiensi Penggunaan Sumber daya Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Pertumbuhan Ekonomi	101,47	Perencanaan dan Pembangunan Industri	10.548.696.737	9.109.049.984	86,35%	99,15%
		Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	48.919.800	48.746.500	99,65%	99,02%
		Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	29.559.800	29.553.650	99,98%	99,01%
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	277.743.000	277.293.000	99,84%	99,02%
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	470.593.000	443.763.000	94,30%	99,07%
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	602.705.400	565.894.000	93,89%	99,07%
		Pengembangan UMKM	546.695.600	533.422.000	97,57%	99,04%
		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.811.469.550	6.715.154.600	98,59%	99,03%
		Pemasaran Pariwisata	245.766.800	233.633.500	95,06%	99,06%
		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	603.983.100	550.442.800	91,14%	99,10%
		Efisiensi				

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 11 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi yaitu:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran Rp10.548.696.737,- dan terealisasi Rp9.109.049.984,- atau sebesar 86,35%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,15%.
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan anggaran sebesar Rp48.919.800,- dan terealisasi Rp48.746.500,- atau sebesar 99,65%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan anggaran sebesar Rp29.559.800,- dan terealisasi Rp29.553.650,- atau sebesar 99,98%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,01%.
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan anggaran sebesar Rp277.743.000,- dan terealisasi Rp277.293.000,- atau sebesar 99,84%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan anggaran sebesar Rp470.593.000,- dan terealisasi Rp443.763.000,- atau sebesar 94,30%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,07%.
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan anggaran sebesar Rp602.705.400,- dan terealisasi Rp565.894.000,- atau sebesar 93,89%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,07%.
7. Program Pengembangan UMKM dengan anggaran sebesar Rp546.695.600,- dan terealisasi Rp533.422.000,- atau sebesar 97,57%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,04%.
8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dengan anggaran sebesar Rp6.811.469.550,- dan terealisasi Rp6.715.154.600,- atau sebesar 98,59%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,03%.
9. Program Pemasaran Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp245.766.800,- dan terealisasi Rp233.633.500,- atau sebesar 95,06%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,06%.

10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan anggaran sebesar Rp603.983.100,- dan terealisasi Rp550.442.800,- atau sebesar 91,14%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,10%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi sebesar 99,10%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja antara lain sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri.

Dalam upaya pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Koperasi dan UKM antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, KSP/USP Koperasi.
2. Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi.
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian.
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pemberdayaan usaha mikro.
6. Program Pengembangan UMKM terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengembangan usaha mikro.

Dalam upaya pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung

pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata serta pengelolaan destinasi pariwisata.
2. Program Pemasaran Pariwisata terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

10.2. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) PDRB perkapita:

Tabel 3.29
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
PDRB Perkapita

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
PDRB Perkapita	Ribu Rupiah	58.993	61.973	64.953	67.933	70.913	73.893
Realisasi							
PDRB Perkapita	Ribu Rupiah	60.247	64.410	68.886	69.142	72.388*	78.987**
Capaian Kinerja							
PDRB Perkapita	%	102,13	103,93	106,06	101,78	102,08	106,89
Kategori		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS

Indikator kinerja indeks PDRB perkapita merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama PDRB Perkapita tahun 2022 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target indikator kinerja PDRB Perkapita Kota Salatiga tahun 2022 sebesar 73.893 ribu rupiah dan terealisasi sebesar 78.987 ribu rupiah sehingga capaian kinerja adalah 106,89% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi untuk indikator kinerja PDRB Perkapita Kota Salatiga pada tahun 2017 sebesar 60.247 ribu rupiah, tahun 2018 sebesar 64.410 ribu rupiah, Tahun 2019 sebesar 68.886 ribu rupiah, tahun 2020 sebesar 69.142 ribu rupiah, tahun 2021 sebesar 72.388 ribu rupiah dan tahun 2022 sebesar 78.987 ribu rupiah. Artinya realisasi indikator PDRB Perkapita Kota Salatiga terus mengalami peningkatan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

PDRB per kapita Kota Salatiga tahun 2022 adalah 78.987 ribu rupiah, sedangkan target kinerja PDRB per Kapita yang tertuang dalam RPJMD adalah 73.893 ribu rupiah. Dengan demikian target akhir RPJMD Kota Salatiga telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 106,89%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

tidak ada standar nasional dalam indikator kinerja PDRB Perkapita.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Tambahan investasi masing-masing lapangan usaha berjalan sesuai dengan rencana, baik investasi pemerintah maupun swasta.
2. Sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku ekonomi.
3. Adanya peningkatan daya saing serta promosi-promosi unggulan daerah yang telah dilaksanakan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.30
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja PDRB Perkapita

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
PDRB perkapita	106,89	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	8.220.000	5.563.500	67,68%	99,37%
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.584.580.870	4.545.177.387	99,14%	99,07%
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	910.732.000	33.817.000	3,71%	99,97%
		Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	249.151.800	210.583.050	84,52%	99,21%
		Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	9.578.900	9.538.350	99,58%	99,07%
Efisiensi						99,22%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 5 program untuk mendukung capaian indikator PDRB perkapita yaitu:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan anggaran sebesar Rp8.220.000,- dan terealisasi sebesar Rp5.563.500,- atau 67,68%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,37%.
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp4.584.580.870,- dan terealisasi sebesar Rp4.545.177.387,- atau 99,14%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,07%.
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan anggaran sebesar Rp910.732.000,- dan terealisasi sebesar Rp33.817.000,- atau 3,71%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,97%.
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran sebesar Rp249.151.800,- dan terealisasi sebesar Rp210.583.050,- atau 84,52%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,21%.
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp9.578.900,- dan terealisasi sebesar Rp9.538.350,- atau 99,58%,

sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,07%

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja PDRB perkapita sebesar 99,22%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target PDRB perkapita, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Perdagangan antara lain sebagai berikut:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan, penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (stp) dari waralaba dalam negeri, dan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat.
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi.
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan metrologo legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

11. Tujuan/Sasaran Strategis: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah Yang Mendorong Pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dan Antar Pelaku Investasi Dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga.

Tujuan/Sasaran 11 (sebelas) Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah Yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi Dalam Memperluas Kesempatan Kerja di

Kota Salatiga terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu pertumbuhan nilai investasi dan tingkat pengangguran terbuka. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Strategis 11 (sebelas) adalah:

1. Meningkatnya realisasi investasi dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): kenaikan nilai investasi PMA dan kenaikan nilai investasi PMDN.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Sasaran ini adalah:

- Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): persentase penempatan tenaga kerja.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Berikut Analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pertumbuhan Nilai Investasi:

11.1.1. Pertumbuhan Nilai Investasi

Investasi adalah istilah yang dijadikan mantra untuk segala yang berbau ekonomi. Lewat investasi, pemerintah berusaha mencapai target pertumbuhan ekonomi. Caranya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya.

Data perkembangan investasi tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.31
Perkembangan Nilai Investasi 2017-2022

Nilai Investasi	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Nilai Investasi PMA	Milyar Rupiah	0	71	970,183	333,121	1.221,011	289,111
Nilai Investasi PMDN	Milyar Rupiah	229,056	174,756	654,454	183,334	92,592	101,195
Jumlah	Milyar Rupiah	229,056	245,756	1.624,637	516,455	1.313,603	390,306

Sumber : DPMPTSP

Untuk menghitung pertumbuhan nilai investasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Nilai Investasi} = \frac{\text{investasi tahun } n - \text{investasi tahun } (n-1)}{\text{Investasi tahun } (n-1)} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, realisasi pertumbuhan nilai investasi tahun 2021 sebagai berikut:

$$- 70,29\% = \frac{390,306 - 1.313,603}{1.313,603} \times 100\%$$

Berdasarkan data diatas, berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Pertumbuhan Nilai Investasi sebagai berikut:

Tabel 3.32
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pertumbuhan Nilai Investasi

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Pertumbuhan Nilai Investasi	%	2,34	2,43	2,49	2,66	2,81	3
Realisasi							
Pertumbuhan Nilai Investasi	%	-42,58	7,29	373,11	-68,21	154,35	-70,29
Capaian Kinerja							
Pertumbuhan Nilai Investasi	%	0	300	14.984	0	5.493	0
Kategori		Kurang	Sangat Baik	Sangat Baik	Kurang	Sangat Baik	Kurang

Sumber : DPMPTSP

Indikator kinerja indeks Pertumbuhan Nilai Investasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian indikator kinerja Utama Pertumbuhan Nilai Investasi tahun 2022 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target indikator Pertumbuhan Nilai Investasi akhir RPJMD tahun 2022 adalah 3% dan terealisasi minus 70,29% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 0% dengan kategori Kurang.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja untuk indikator Pertumbuhan nilai investasi di Kota Salatiga tahun 2017 sebesar -42,58%, tahun 2018 sebesar 7,29%, 2019 sebesar 373,11%, tahun 2020 sebesar 0%, tahun 2021 sebesar 154,35% dan tahun 2022 sebesar 0%. Dengan demikian realisasi kinerja indikator pertumbuhan nilai investasi terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sampai tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 kemudian meningkat di tahun 2021 dan turun kembali di tahun 2022.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, pertumbuhan nilai investasi diharapkan mencapai 3%. dengan demikian target akhir RPJMD tercapai di tahun 2021 dengan tingkat kemajuan sebesar 5145%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab tidak tercapainya target pertumbuhan nilai investasi di Kota Salatiga dalam kondisi pasca pandemi covid-19 antara lain:

1. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha;
2. Pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi yang dilaksanakan secara intensif meningkatkan daya tarik investasi
3. Meningkatnya kesadaran investor untuk melaporkan data-data investasi.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.33

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Pertumbuhan Nilai Investasi	0	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	71.500.000	69.213.000	96,80%	-
		Promosi Penanaman Modal	339.500.000	314.955.000	92,77%	-
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	447.055.000	374.194.100	83,70%	-
		Pelayanan Penanaman Modal	188.415.700	155.683.050	82,63%	-
Efisiensi						-

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 4 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi yaitu:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan anggaran Rp71.500.000,- dan terealisasi Rp69.213.000,- atau sebesar 96,80%.
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan anggaran Rp339.500.000,- dan terealisasi Rp314.955.000,- atau sebesar 92,77%.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran Rp447.055.000,- dan terealisasi Rp374.194.100,- atau sebesar 83,70%.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan anggaran Rp188.415.700,- dan terealisasi Rp155.683.050,- atau sebesar 82,63%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Pertumbuhan Nilai Investasi, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada DPMPTSP antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembuatan peta potensi investasi.
2. Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelegaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.

11.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin kecil tingkat pengangguran terbuka, semakin baik capaiannya kinerja pemerintah.

Pengangguran terbuka meliputi:

- a. penduduk yang sedang mencari pekerjaan;
- b. penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha;
- c. penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;

d. penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai.

Berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Tingkat Pengangguran Terbuka:

Tabel 3.34
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,28	6,13	5,98	5,83	7,5	5,73
Realisasi							
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,96	4,28	4,43	7,44	7,26	5,58
Capaian Kinerja							
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	136,94	130,18	125,92	72,38	103,20	102,62
Kategori		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Cukup	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target tingkat pengangguran terbuka (TPT) akhir RPJMD tahun 2022 adalah 5,73% terealisasi 5,58% dan capaian indikator kinerja sebesar 102,62% dengan katagori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga Tahun 2017 sebesar 3,96%, tahun 2018 sebesar 4,28%, tahun 2019 sebesar 4,43%, tahun 2020 sebesar 7,44%, tahun 2021 sebesar 7,26% dan tahun 2022 sebesar 5,73%. Dengan demikian realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga tahun 2020 menurun, namun pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami peningkatan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir jangka menengah RPJMD sebesar 5.73% pada tahun 2022 tercapai 5,58%. Dengan demikian target akhir RPJMD telah tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan 102,62%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional.

Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 Jawa Tengah tercatat 5,57% dan TPT Indonesia tercatat 5,86%. Dibandingkan dengan TPT Indonesia persentase TPT Kota Salatiga lebih rendah sedangkan dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah persentase TPT Kota Salatiga lebih tinggi.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pengangguran menjadi permasalahan strategis dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan tingkat pendapatan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Banyaknya pengangguran di Kota Salatiga pada tahun 2022 merupakan efek dari pandemi covid-19 yang berlangsung selama 2 (dua) tahun.

Guna mengatasi masalah pengangguran, Pemerintah Kota Salatiga telah melakukan berbagai langkah, antara lain:

1. Membuka lapangan pekerjaan di Salatiga dan mencari lapangan pekerjaan di luar daerah;
2. Memfasilitasi program pra kerja;
3. Fasilitasi *job cumpasing*;
4. Pemberian bantuan sembako.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.35
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Tingkat Pengangguran Terbuka	102,62	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.582.485.382	2.193.545.524	84,94%	99,17%

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
		Penempatan Tenaga Kerja	90.174.000	87.150.000	96,65%	99,06%
		Hubungan Industrial	69.548.000	66.053.000	94,97%	99,07%
	Efisiensi					99,17%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran Rp2.582.485.382,- dan terealisasi Rp2.193.545.524,- atau sebesar 84,94%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,17%.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran Rp90.174.000,- dan terealisasi Rp87.150.000,- atau sebesar 96,65%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,06%.
3. Program Hubungan Industrial dengan anggaran Rp69.548.000,- dan terealisasi Rp66.053.000,- atau sebesar 94,97%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,07%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 99,17%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja antara lain sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan latihan kerja bagi pencari kerja.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran pengelolaan informasi pasar kerja, peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pencari pekerja Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia dan penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan serta penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja.

3. Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.

12. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial

Tujuan/Sasaran Strategis 12 (dua belas) Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Penduduk Miskin dan Skor Pola Pangan Harapan.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 12 (dua belas) adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Penanganan PMKS dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Cakupan Penanganan PMKS. Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:
 - Dinas Sosial
2. Meningkatnya Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Proporsi Penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 12 (Dua belas) adalah:
 - Dinas Pangan

Berikut Analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penduduk Miskin:

12.1. Persentase Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Untuk mengukur capaian Indikator Utama Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga digunakan data BPS. Berikut data penduduk miskin Kota Salatiga tahun 2017-2022:

Tabel 3.36
Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Penduduk Miskin	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah Penduduk Miskin (KK)	Ribu	9,55	9,24	9,206	9,69	10,14	9,45

Sumber : BPS

Berdasarkan data diatas, berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Persentase Penduduk Miskin tahun 2022 adalah:

Tabel 3.37
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Persentase Penduduk Miskin

Indikator Kinerja (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Penduduk Miskin	%	5,14	5,04	4,94	4,84	5,5	4,7
Realisasi							
Penduduk Miskin	%	5,07	4,84	4,76	4,94	5,14	4,73
Capaian Kinerja							
Penduduk Miskin	%	101,36	103,96	103,64	97,93	106,55	99,36
Kategori		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik

Sumber : BPS

Indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga tahun 2022 sebesar 4,7% dan terealisasi 4,73% sehingga capaian kinerjanya adalah 99,36% dengan kategori Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi Persentase Penduduk Miskin tahun 2017 sebesar 5,07%, tahun 2018 sebesar 4,84%, tahun 2019 sebesar 4,76%, tahun 2020 sebesar 4,94%, tahun 2021 sebesar 5,14% dan tahun 2022 sebesar 4,73%. Dengan demikian Realisasi Kinerja untuk menurunkan angka penduduk miskin di Kota Salatiga terus mengalami peningkatan selama tahun 2017 sampai dengan 2019 kemudian

menurun pada tahun 2020 dan meningkat di tahun 2021 sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target realisasi kinerja Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga pada akhir RPJMD tahun 2022 adalah sebesar 4,7%, sedangkan realisasi kinerja tahun 2022 adalah 4,73%, dengan demikian target akhir RPJMD belum tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan 99,36%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Berdasarkan data BPS, Persentase Penduduk Miskin tahun 2022 di Indonesia tercatat 9,57% dan di Provinsi Jawa Tengah tercatat 10,98%, sedangkan persentase penduduk miskin Kota Salatiga tahun 2022 sebesar 4,73%. Dengan demikian Persentase penduduk miskin Kota Salatiga lebih rendah daripada nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor yang menyebabkan turunnya jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga adalah berakhirnya pandemi covid-19 yang telah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) tahun sehingga aktivitas ekonomi penduduk mulai berjalan normal seperti sebelum pandemi terjadi.

Pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga meliputi 3 kelompok program, yaitu

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
2. Kelompok program pemberdayaan masyarakat
3. Kelompok program pemberdayaan usaha Mikro Kecil dan Menengah.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.38
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Persentase Penduduk Miskin	99,36	Pemberdayaan Sosial	865.700.000	848.635.200	98,03%	99,01%
		Rehabilitasi Sosial	1.237.001.400	1.200.833.154	97,08%	99,02%
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.337.959.200	2.172.681.878	92,93%	99,06%
		Penanganan Bencana	207.445.000	139.260.000	67,13%	99,32%
Efisiensi						99,06%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 4 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin yaitu:

1. Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran Rp865.700.000,- dan terealisasi Rp848.635.200,- atau sebesar 98,03%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,01%.
2. Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran Rp1.237.001.400,- dan terealisasi Rp1.200.833.154,- atau sebesar 97,08%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran Rp2.337.959.200,- dan terealisasi Rp2.172.681.878,- atau sebesar 92,93%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,06%.
4. Program Penanganan Bencana dengan anggaran Rp207.445.000,- dan terealisasi Rp139.260.000,- atau sebesar 67,13%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,32%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin sebesar 99,06%.

g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Sosial antara lain sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah.

2. Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan data fakir miskin.
4. Program Penanganan Bencana terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

12.2. Skor Pola Pangan harapan

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

Berikut tabel capaian kinerja Indikator kinerja Utama (IKU) pada Pola Pangan Harapan:

Tabel 3.39
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pola Pangan Harapan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Pola Pangan Harapan	Skor	91	91,2	91,5	91,7	92	92,2
Realisasi							
Pola Pangan Harapan	Skor	91,8	91	93,5	93,9	90,0	95,1
Capaian Kinerja							
Pola Pangan Harapan	%SWA	100,88	99,78	102,18	102,40	97,83	103,15
Kategori		Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian

Indikator kinerja Pola Pangan Harapan merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Pola Pangan Harapan dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Skor Pola Pangan Harapan tahun 2022 sebesar 92,2 dan terealisasi sebesar 95,1 sehingga capaian kinerja indikator Skor Pola Pangan Harapan adalah 103,15% dengan kategori Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Salatiga setiap tahun semakin baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi Skor Pola Pangan Harapan tahun 2017 sebesar 91,8, tahun 2018 sebesar 91, tahun 2019 sebesar 93,5, tahun 2020 sebesar 93,9, tahun 2021 sebesar 90,0 dan tahun 2022 sebesar 95,1. Dengan Demikian Skor Pola Pangan Harapan mengalami penurunan di tahun 2018, meningkat kembali pada tahun 2019 dan tahun 2020 kemudian kembali menurun di tahun 2021 dan akhirnya meningkat lagi di tahun 2022.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target Skor Pola Pangan Harapan pada akhir RPJMD tahun 2022 adalah sebesar 92,2, sedangkan pada tahun 2022 sudah mencapai 95,1 dengan demikian target skor pola pangan pada RPJMD harapan berhasil tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan 103,15%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Standar nilai Pola Pangan Harapan nasional tahun 2022 adalah 92,8, dengan demikian skor Pola Pangan Harapan Pemerintah Kota Salatiga telah melampaui standar Pola Pangan Harapan nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan Peningkatan KAP (knowledge, Attitude, Practice) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan local, teknologi pengolahan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.40
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja Pola Pangan Harapan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Pola Pangan Harapan	103,15	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.567.736.300	1.503.429.300	95,90%	99,07%
		Penanganan Kerawanan Pangan	35.025.800	26.773.600	76,44%	99,26%
		Pengawasan Keamanan Pangan	56.432.100	48.567.300	86,06%	99,17%
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	576.519.800	511.504.850	88,72%	99,14%
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	44.499.900	38.025.000	85,45%	99,17%
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.648.360.700	1.486.425.550	90,18%	99,13%
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.348.605.150	1.293.889.000	95,94%	99,07%
		Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	738.169.000	516.462.000	69,97%	99,32%
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	291.085.200	283.482.800	97,39%	99,06%
		Penyuluhan Pertanian	162.908.000	146.690.000	90,04%	99,13%
Efisiensi						99,12%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 9 program untuk mendukung capaian indikator Pola Pangan Harapan yaitu:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan anggaran Rp1.567.736.300,- dan terealisasi Rp1.503.429.300,- atau sebesar 95,90%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,07%.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan anggaran Rp35.025.800,- dan terealisasi Rp26.773.600,- atau sebesar 76,44%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,26%.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan anggaran Rp56.432.100,- dan terealisasi

Rp48.567.300,- atau sebesar 86,06%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,17%.

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan anggaran Rp576.519.800,- dan terealisasi Rp511.504.850,- atau sebesar 88,72%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,14%.
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan anggaran Rp44.499.900,- dan terealisasi Rp38.025.000,- atau sebesar 85,45%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,17%.
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran Rp1.648.360.700,- dan terealisasi Rp1.486.425.550,- atau sebesar 90,18%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,13%.
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan anggaran Rp1.348.605.150,- dan terealisasi Rp1.293.889.000,- atau sebesar 95,94%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,07%.
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan anggaran Rp738.169.000,- dan terealisasi Rp516.462.000,- atau sebesar 69,97%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,32%.
9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan anggaran Rp291.085.200,- dan terealisasi Rp283.482.800,- atau sebesar 97,39%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,06%.
10. Program Penyuluhan Pertanian dengan anggaran Rp162.908.000,- dan terealisasi Rp146.690.000,- atau sebesar 90,04%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,13%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Pola Pangan Harapan sebesar 99,12%.

g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dalam upaya meningkatkan skor Pola Pangan Harapan, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Pangan dan Pertanian adalah:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri dari 3 kegiatan dengan

sasaran kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan pengawasan pangan segar.
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan.
5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan produksi perikanan budidaya.
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan dan mikro organisme, peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak,
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengembangan prasarana pertanian dan pembangunan prasarana pertanian.
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis masyarakat veteriner.
10. Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran pelaksanaan penyuluhan pertanian.

13. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, Dan Pencapaian Kesetaraan Dan Keadilan Gender

Tujuan/Sasaran strategis 13 (tiga belas) Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU):

1. Capaian Kota Layak Anak (KLA),
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG),
3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 13 (tiga belas) adalah Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

1. Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan
2. Persentase Perempuan dalam Parlemen
3. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 13 (tiga belas) adalah:

➤ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Berikut Analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tujuan/Sasaran Strategis 13 (tiga belas) Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender:

13.1. Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)

Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Berikut tabel capaian kinerja Indikator kinerja Utama (IKU) Capaian Kota Layak Anak:

Tabel 3.41
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Capaian Kota Layak Anak

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Skor	239	500	650	675	675	680
Realisasi							
Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Skor	275	606,5	794,95	794,95	607,35	607,35

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Capaian Kinerja							
Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Skor	115	121,3	122,3	117,77	89,98	89,32
Kategori		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik

Sumber : DP3APPKB

Indikator kinerja Capaian Kota Layak Anak (KLA) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Capaian Kota Layak anak dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target skor Capaian KLA akhir RPJMD tahun 2022 adalah sebesar 680 dan terealisasi sebesar 607,35, sehingga capaian kinerja indikator skor Capaian Kota Layak Anak adalah 89,32 dengan kategori Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja untuk indikator skor capaian KLA tahun 2017 sebesar 275, tahun 2018 sebesar 606,5, tahun 2019 sebesar 794,95, tahun 2020 sebesar 794,5, tahun 2021 607,35 dan tahun 2022 607,35 yang artinya realisasi kinerja untuk indikator skor KLA terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 kemudian menurun di tahun 2021 dan masih sama di tahun 2022.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator skor capaian KLA adalah sebesar 680, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 607,35, dengan demikian target RPJMD untuk indikator skor capaian KLA belum tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 89,32%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013, standar nasional skor kota layak anak adalah 1000, maka jika dibandingkan dengan skor capaian tahun 2022 sebesar 607,35, Kota Salatiga masih perlu

meningkatkan kinerjanya untuk mencapai standar nasional yang telah ditetapkan. Dengan skor 607,35 poin tersebut pada tahun 2022 Kota Salatiga mendapatkan Predikat Menuju Kota Layak Anak Kategori Madya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian indikator kinerja untuk Kota Layak Anak tidak terlepas dari peran semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dalam mendukung pengisian dan verifikasi data Kota Layak Anak terkait dalam penyiapan data dan verifikasi Kota Layak Anak yang didalamnya tercakup unsur pemenuhan hak-hak anak. Upaya yang dilakukan untuk mencapai skor Kota Layak Anak antara lain:

1. Advokasi pendidik sebaya pencegahan kekerasan pada anak di sekolah;
2. Orientasi sistem perlindungan anak (SPA) bagi aparat kelurahan kecamatan
3. Lokakarya Disiplin positif menuju Sekolah Ramah Anak (LRA)
4. Sosialisasi pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta kasih sayang dalam keluarga.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.42
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja Capaian Kota Layak Anak

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Kota Layak Anak (KLA)	89,32	Perlindungan Khusus Anak	107.692.600	103.532.500	96,14%	98,92%
		Pemenuhan Hak Anak (PHA)	163.128.000	134.195.500	82,26%	99,08%
		Peningkatan Kualitas Keluarga	708.900.000	636.163.660	89,74%	99,00%
Efisiensi						99,00%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator Kota Layak Anak (KLA) yaitu:

1. Program Perlindungan Khusus Anak dengan anggaran Rp107.692.600,- dan terealisasi Rp103.532.500,- atau sebesar 96,14%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,92%.

2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan anggaran Rp163.128.000,- dan terealisasi Rp134.195.500,- atau sebesar 82,26%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,08%.
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan anggaran Rp708.900.000,- dan terealisasi Rp636.163.660,- atau sebesar 89,74% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,00%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Kota Layak Anak 99,00%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meningkatkan skor capaian KLA, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada DP3APPKB antara lain:

1. Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak.
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak, penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak.
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.

13.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan suatu indeks untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) lebih mengacu pada data terpilah antara laki-laki dan perempuan. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Indeks Pembangunan Gender:

Tabel 3.43
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks Pembangunan Gender

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	96,22	96,41	96,61	96,81	97,01	97,20
Realisasi							
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	96,02	95,34	95,12	95	95,18	95,44
Capaian Kinerja							
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	99,79	98,89	98,46	98,13	98,11	98,19
Kategori		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : BPS

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Gender dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Target Indeks Pembangunan Gender (IPG) akhir RPJMD tahun 2022 adalah 97,20 dan terealisasi dengan skor 95,44. Sehingga capaian kinerja pada indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 98,19% dengan kategori Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi kinerja nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2017 sebesar 96,02, tahun 2018 sebesar 95,34, tahun 2019 sebesar 95,12, tahun 2020 sebesar 95, tahun 2021 sebesar 95,18 dan tahun 2022 sebesar 95,44. Dengan demikian realisasi dan capaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) terus mengalami penurunan sampai tahun 2020 dan meningkat di tahun 2021 dan tahun 2022.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target pada akhir RPJMD Tahun 2022 untuk indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah 97,20 dan pada tahun 2022 baru tercapai 95,44. Dengan demikian target

akhir RPJMD belum tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan sebesar 98,19%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Berdasarkan data BPS, nilai (IPG) Jawa Tengah adalah 92,83 dan nilai IPG nasional adalah 91,63. Dengan demikian, nilai IPG Kota Salatiga masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan IPG Jawa Tengah dan nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh pemerintah. Namun pada implementasinya upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk perempuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan persamaan status dan kedudukan perempuan dan laki-laki diimplementasikan melalui berbagai program pembangunan seperti peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi Pemerintah, organisasi perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya. nilai IPG dipengaruhi karena adanya beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.44
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indeks Pembagunan Gender (IPG)	98,19	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	212.981.000	198.676.500	93,28%	99,05%

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
		Perlindungan Perempuan	103.790.000	78.920.500	76,04%	99,23%
		Peningkatan Kualitas Keluarga	708.900.000	636.163.660	89,74%	99,09%
Efisiensi						99,09%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran Rp212.981.000,- dan terealisasi Rp198.676.500,- atau sebesar 93,28%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,05%.
2. Program Perlindungan Perempuan dengan anggaran Rp103.790.000,- dan terealisasi Rp78.920.500,- atau sebesar 76,04%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,23%.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan anggaran Rp708.900.000,- dan terealisasi Rp636.163.660,- atau sebesar 89,74%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,09%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) 99,09%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meningkatkan skor capaian IPG, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada DP3APPKB antara lain:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik hukum sosial dan ekonomi, serta penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
2. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak

13.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada dasarnya sama dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) namun Indeks Pemberdayaan Gender mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Angka IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Indeks Pemberdayaan Gender:

Tabel 3.45
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks Pemberdayaan Gender

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	80,95	81,08	81,20	81,33	81,45	81,57
Realisasi							
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	80,83	82,16	76,19	76,07	79,08	79,29
Capaian Kinerja							
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	99,85	101,33	93,83	93,53	97,09	97,20
Kategori		Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : BPS

Indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) akhir RPJMD tahun 2022 adalah 81,57 dan tahun 2022 terealisasi dengan skor 79,29. Sehingga capaian kinerja pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 97,20% dengan kategori Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2017 sebesar 80,83, tahun 2018 sebesar 82,16, tahun 2019 sebesar 76,19, tahun 2020 sebesar 76,07, tahun 2021 sebesar 79,08 dan tahun 2022 sebesar 79,29. Dengan demikian realisasi dan capaian kinerja untuk indikator nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami kenaikan di tahun 2018 kemudian turun di tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya naik lagi di tahun 2021 dan tahun 2022.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target pada akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator IDG adalah sebesar 81,57 dan pada tahun 2022 baru tercapai 79,29. Dengan demikian target akhir RPJMD belum tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan sebesar 97,20%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Berdasarkan data BPS, skor IDG Provinsi Jawa Tengah adalah 73,78 dan skor IDG Nasional adalah 76,59. Dengan demikian, skor IDG Kota Salatiga masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kesetaraan gender, atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mengacu pada kesetaraan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian atas perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ataupun di tempat kerja. Kesetaraan Gender adalah kebebasan memilih peluang-peluang yang diinginkan tanpa ada tekanan dari pihak lain, kedudukan dan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan dan dalam memperoleh manfaat dari lingkungan. Dalam dunia politik, ketimpangan gender tampak dari keterwakilan perempuan dalam parlemen. Proporsi perempuan di kursi DPRD jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Dalam aspek ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tidak banyak meningkat.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.46
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	97,20	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	212.981.000	198.676.500	93,28%	99,04%
		Perlindungan Perempuan	103.790.000	78.920.500	76,04%	
Efisiensi						99,10%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 2 program untuk mendukung capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran Rp212.981.000,- dan terealisasi Rp198.676.500,- atau sebesar 93,28% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,04%.
2. Program Perlindungan Perempuan dengan anggaran Rp103.790.000,- dan terealisasi Rp78.920.500,- atau sebesar 76,04% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,22%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 99,10%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meningkatkan skor capaian IDG, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada DP3APPKB antara lain:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik hukum sosial dan ekonomi, serta penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

2. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

13.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Indeks Pembangunan Manusia:

Tabel 3.47
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	81,65	82,16	82,67	83,18	75	84,20
Realisasi							
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	81,14	81,68	82,41	83,14	83,60	84,35
Capaian Kinerja							
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	99,38	99,42	99,69	99,95	111,47	100,18
Kategori		Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : BPS

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 adalah 84,20 dan realisasi nilai IPM tahun 2022 adalah 84,35 dengan demikian capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,18% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Indeks IPM tahun 2017 sebesar 81,14; tahun 2018 sebesar 81,68, tahun 2019 sebesar 82,41, tahun 2020 sebesar 83,14, tahun 2021 sebesar 83,60 dan tahun 2021 sebesar 84,35. Dengan demikian realisasi dan capaian Indeks IPM Kota Salatiga terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target Akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator IPM adalah sebesar 84,20 dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar sebesar 84,35 sehingga target akhir RPJMD berhasil tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan sebesar 100,18%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional.

Berdasarkan data BPS, tahun 2022 nilai IPM nasional sebesar 72,91 dan IPM Jawa Tengah sebesar 72,79 dengan demikian maka capaian IPM Kota Salatiga telah melebihi capaian IPM Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator yang mencerminkan kualitas hidup penduduk yang meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Rill Per Kapita. Dari ke empat komponen pendukung tersebut realisasi tiap tahun di Kota Salatiga selalu meningkat.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program yang menunjang pencapaian kinerja pada indikator IPM adalah anggaran untuk pelaksanaan program dan

kegiatan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang pencapaian kinerja pada indikator IPM adalah pelaksanaan program yang dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah serta Peningkatan PDRB Per Kapita.

Berdasarkan perhitungan efisiensi 4 komponen di atas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 99,09%.

14. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan/Sasaran Strategis 14 (empat belas) Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks PMPRB.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Strategis 14 (empat belas) adalah:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat).

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Kecamatan

2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan penerapan teknologi dengan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

a. Tingkat ketersediaan media informasi publik; tingkat pengembangan layanan e government dan smart city; persentase ketersediaan data statistik;

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e arsip)

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara (ASN) dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Indeks Profesionalitas ASN

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

4. Meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

a. Opini BPK

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

- Inspektorat
- Badan Keuangan Daerah

b. Skor LAKIP/LKjIP

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

- Sekretariat Daerah
- Bappeda

Indeks PMPRB merupakan Penilaian Mandiri yang dilaksanakan Pemerintah Kota Salatiga dengan menggunakan LHE melalui aplikasi PMPRB, yang selanjutnya akan dievaluasi dan menghasilkan Indeks RB.

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks PMPRB:

Tabel 3.48
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks PMPRB

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Indeks PMPRB	%	60	60	62	62	65	65
Realisasi							
Indeks PMPRB	%	58,25	75,4	82,11	77,84	70,95	74,98
Capaian Kinerja							
Indeks PMPRB	%	97,08	125,66	157,66	119,75	109,15	115,35
Kategori		Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Inspektorat

Indikator kinerja Indeks PMPRB) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks PMPRB dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target nilai Indeks PMPRB pada akhir RPJMD tahun 2022 adalah 65 terealisasi dan 74,98. Nilai Indeks PMPRB ini adalah realisasi PMPRB tahun 2022 dan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian realisasi target Indeks PMPRB tahun 2022 sebesar 115,35% dengan kategori Sangat Baik.
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
Realisasi kinerja nilai indeks PMPRB tahun 2017 sebesar 58,25, tahun 2018 sebesar 75,4, tahun 2019 sebesar 82,11, tahun 2020 sebesar 77,84, tahun 2021 sebesar 70,95 dan tahun 2022 sebesar 74,98. Dengan demikian realisasi dan capaian kinerja untuk indikator Indeks PMPRB terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019 kemudian menurun di tahun 2020 dan tahun 2021 sedangkan tahun 2022 mengalami kenaikan kembali.
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).**
Target jangka menengah pada akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator indeks PMPRB adalah 65 dan pada tahun 2022 sudah tercapai nilai indeks PMPRB 74,98. Dengan demikian target RPJMD untuk indikator Indeks PMPRB telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 115,35%.
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**
Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Indeks PMPRB.
- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
Keberhasilan meningkatkan nilai PMPRB yang melampaui target disebabkan oleh pelaksanaan PMPRB telah mengacu pada Road Map RB Pemerintah Kota Salatiga tahun 2020-2022 yang tertuang dalam rencana aksi yang dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan instrument penilaian LKE RB.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya**
Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.49
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja Indeks PMPRB

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indeks PMPRB	115,35	Penyelenggaraan Pengawasan	52.351.900	24.284.100	46,39%	99,60%
		Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	194.404.000	181.386.600	93,30%	99,19%
		Pembinaan Perpustakaan	1.058.710.750	984.655.898	93,01%	99,19%
		Pengelolaan Arsip	427.622.200	411.017.050	96,12%	99,17%
		Informasi dan Komunikasi Publik	948.305.000	898.042.886	94,70%	99,18%
		Aplikasi Informatika	3.218.781.800	3.207.605.526	99,65%	99,14%
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral	81.735.300	69.294.000	84,78%	99,27%
		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	345.806.400	328.591.300	95,02%	99,18%
		Kepegawaian Daerah	1.721.544.100	934.691.122	54,29%	99,53%
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.896.923.598	3.869.797.180	79,03%	99,31%
		Pendaftaran Penduduk	949.915.400	732.698.691	77,13%	99,33%
		Pencatatan Sipil	37.529.000	37.199.000	99,12%	99,14%
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	34.019.000	32.410.220	95,27%	99,17%
		Pengelolaan Keuangan Daerah	37.739.573.400	3.184.467.970	8,44%	99,93%
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.435.084.000	1.137.836.871	79,29%	99,31%
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	897.957.900	769.802.200	85,73%	99,26%
		Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.537.832.200	1.246.907.350	81,08%	99,30%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.294.781.200	1.211.377.470	93,56%	99,19%
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	118.558.600	87.745.500	74,01%	99,36%
		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	23.088.338.300	18.749.275.848	81,21%	99,30%

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.549.041.500	2.215.645.064	86,92%	99,25%
		Perekonomian dan Pembangunan	1.542.140.400	1.187.763.650	77,02%	99,33%
		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	122.758.000	118.071.650	96,18%	99,17%
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	38.813.972.444	37.996.779.233	97,89%	99,15%
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.375.000	12.375.000	100,00%	99,13%
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	239.705.000	218.263.000	91,05%	99,21%
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	659.853.888.272	606.941.216.972	91,98%	99,20%
		Efisiensi				99,24%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 2 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada Inspektorat yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp52.351.900,- dan terealisasi sebesar Rp24.284.100,- atau sebesar 46,39%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,60%.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran sebesar Rp194.404.000,- dan terealisasi sebesar Rp181.386.600,- atau sebesar 93,30%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,19%.

Terdapat 2 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada Perpustakaan dan Kearsipan yaitu:

1. Program Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp1.058.710.750,- dan terealisasi sebesar Rp984.655.898,- atau sebesar 93,01%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,19%.
2. Program Pengelolaan Arsip dengan anggaran sebesar Rp427.622.200,- dan terealisasi sebesar Rp411.017.050,- atau sebesar 96,12%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,17%.

Terdapat 4 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp948.305.000,- dan terealisasi sebesar Rp898.042.886,- atau sebesar 94,70%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,18%.
2. Program Aplikasi Informatika anggaran sebesar Rp3.218.781.800,- dan terealisasi sebesar Rp3.207.605.526,- atau sebesar 99,65%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,20%.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral anggaran sebesar Rp81.735.300,- dan terealisasi sebesar Rp69.294.000,- atau sebesar 84,78%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,27%.
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi anggaran sebesar Rp345.806.400,- dan terealisasi sebesar Rp328.591.300,- atau sebesar 95,02%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,18%.

Terdapat 2 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada BKPSDM yaitu:

1. Program Kepegawaian Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.721.544.100,- dan terealisasi sebesar Rp934.691.122,- atau sebesar 54,29%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,53%.
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan anggaran sebesar Rp4.896.923.598,- dan terealisasi sebesar Rp3.869.797.180,- atau sebesar 79,03%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,31%.

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:

1. Program Pendaftaran Penduduk dengan anggaran sebesar Rp949.915.400,- dan terealisasi sebesar Rp732.698.691,- atau sebesar 77,13%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,33%.
2. Program Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp37.529.000,- dan terealisasi sebesar Rp37.199.000,- atau sebesar 99,12%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,14%.
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp34.019.000,- dan terealisasi sebesar Rp32.410.220,- atau sebesar 95,27%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,17%.

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada BPKPD yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp37.739.573.400,- dan terealisasi sebesar

Rp3.184.467.970,- atau sebesar 8,44%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,93%.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.435.084.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.137.836.871,- atau sebesar 79,29%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,31%.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp897.957.900,- dan terealisasi sebesar Rp769.802.200,- atau sebesar 85,73%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,26%.

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada BAPPEDA yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.537.832.200,- dan terealisasi sebesar Rp1.246.907.350,- atau sebesar 81,08%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,30%.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.294.781.200,- dan terealisasi sebesar Rp1.211.377.470,- atau sebesar 93,56%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,19%.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp118.558.600,- dan terealisasi sebesar Rp87.745.500,- atau sebesar 74,01%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,36%.

Terdapat 1 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada Sekretariat DPRD yaitu:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp23.088.338.300,- dan terealisasi sebesar Rp18.749.275.848,- atau sebesar 81,21%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,30%.

Terdapat 2 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada Sekretariat Daerah yaitu:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp2.549.041.500,- dan terealisasi sebesar Rp2.215.645.064,- atau sebesar 86,92%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,25%.
2. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp1.542.140.400,- dan terealisasi sebesar Rp1.187.763.650,- atau sebesar 77,02%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,33%.

Terdapat 4 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada Kecamatan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp122.758.000,- dan terealisasi sebesar Rp118.071.650,- atau sebesar 96,18%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,17%.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp38.813.972.444,- dan terealisasi sebesar Rp37.996.779.233,- atau sebesar 97,89%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,15%.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp12.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp12.375.000,- atau sebesar 100,00%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,13%.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp239.705.000,- dan terealisasi sebesar Rp218.263.000,- atau sebesar 91,05%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,21%.

Terdapat program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada seluruh Perangkat Daerah yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp659.853.888.272,- dan terealisasi sebesar Rp606.941.216.972,- atau sebesar 91,98%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,20%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB sebesar 99,24%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Inspektorat Daerah antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal sasaran kinerjanya yaitu penerbitan laporan hasil pemeriksaan reguler, evaluasi reuiu, audit kinerja, audit kepatuhan, probity audit, Kerjasama pengawasan APIP-APH serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan internal dan eksternal. Sedangkan untuk kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu sasaran kinerjanya yaitu penerbitan LHP tujuan tertentu, pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat, dan pemeriksaan khusus, serta terlaksananya penanganan kerugian daerah oleh TPKD dan Sekretariat TPKD.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan perumusan kegiatan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sasaran kinerjanya yaitu dokumen kebijakan pengawasan, SOP, PKPT dan pembaharuan audit charter, sedangkan untuk kegiatan pendampingan dan asistensi sasaran kinerjanya adalah klinik konsultasi, workshop atau sosialisasi SPIP dan Maturitas SPIP, penilaian RB, sosialisasi WBK/WBBM dan pembangunan ZI, operasionalisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar, Workshop Pengendalian Gratifikasi, sosialisasi LHKPN/LHKASN, verifikasi LHKASN, peringatan hari anti korupsi, monev korsupgah, survei IPAK dan SPI.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan antara lain:

1. Program Pembinaan Perpustakaan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca.
2. Program Pengelolaan Arsip terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
2. Program Aplikasi Informatika terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan Pengelolaan nama domain dan sub domain serta pengelolaan *e-government*.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial terdiri 1 kegiatan penyelenggaraan statistik sektorial.
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada BKPSDM antara lain:

1. Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengembangan kompetensi teknis serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

1. Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk, penataan pendaftaran penduduk dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
2. Program Pencatatan Sipil terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelayanan pencatatan sipil dan penyelenggaraan pencatatan sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database*, penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada BPKPD antara lain:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 kegiatan dengan sasaran kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan barang milik daerah.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada BAPPEDA antara lain:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang

perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Sekretariat DPRD antara lain Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terdiri dari 8 kegiatan dengan sasaran kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Peningkatan Kapasitas DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Pembahasan Kerja Sama Daerah, Fasilitasi Tugas DPRD.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Sekretariat Daerah antara lain:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum dan fasilitasi kerja sama daerah.
2. Program Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Kecamatan antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan koordinasi pemberdayaan desa dan pemberdayaan kelurahan.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian integral dari seluruh proses dan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang didasarkan atas prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah.

Sebagai rencana pengelolaan keuangan tahunan daerah, APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022, disusun dengan pendekatan kinerja dan mengutamakan pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Usulan program kegiatan dan anggaran dinilai tingkat kewajarannya melalui rasionalisasi dan sinkronisasi program. Penilaian kewajaran dan kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan program dan kegiatan yang diusulkan, dapat dilihat dari pelaksanaan program yang sudah diselesaikan oleh perangkat

daerah dengan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan dalam capaian kinerja yang direncanakan.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Target Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar Rp905.568.012.938,- dan terealisasi sebesar Rp901.419.131.752,- atau 99,54%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp946.191.087.524,- maka realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp44.771.955.772,- atau sebesar 2,94%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD saat ini masih relatif rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan. Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi daerah adalah besarnya pendapatan daerah pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target PAD merupakan faktor penting dalam menilai laju pembangunan di daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan tahun 2022 mencapai Rp240.968.965.716,- atau 110,21% dari target yang ditetapkan sebesar Rp218.644.038.938,-. Jika dibandingkan realisasi tahun 2021 yang mencapai Rp280.701.251.597,- maka realisasi tahun 2022 turun sebesar Rp39.732.285.881,- atau 14,15%.

Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.50
Perkembangan PAD Kota Salatiga Tahun 2012 - 2022

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Pendapatan Daerah (Realisasi)	Proporsi %
2012	63.171.463.000	77.798.870.961	562.323.845.006	13,84 %
2013	87.723.650.000	106.100.450.499	603.204.201.915	17,59 %
2014	114.781.747.000	165.747.645.080	727.619.868.812	22,78%
2015	143.835.170.000	167.010.555.173	673.865.039.498	24,78%
2016	172.775.326.000	203.768.652.017	879.784.189.262	23,16%
2017	188.391.649.000	218.453.587.980	880.956.308.959	24,80%
2018	209.772.712.000	208.926.057.032	889.992.411.250	23,48%
2019	221.089.796.000	236.086.218.372	928.019.899.150	25,44%
2020	197.768.282.000	219.553.318.240	890.223.683.933	24,66%
2021	237.406.216.000	280.701.251.597	946.191.087.524	29,67%
2022	218.644.038.938	240.968.965.716	901.419.131.752	26,73%

Sumber : BPKPD (diolah)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Daerah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.046.499.128.242,- dan terealisasi sebesar Rp929.681.271.274,- atau sebesar 88,84%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp956.501.304.732,- maka mengalami penurunan sebesar Rp26.820.033.458,- atau sebesar 0,03%.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp142.431.115.304,- dan realisasinya sebesar Rp142.431.115.304,- atau mencapai 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp155.741.332.512,- maka mengalami penurunan sebesar Rp13.310.217.208,- atau sebesar 0,09%.

Pengeluaran pembiayaan tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,- dan realisasinya mencapai Rp1.500.000.000,- atau 100,00%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.000.000.000,-, maka realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.500.000.000,- atau sebesar 50%.

Pembiayaan Netto tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp Rp140.931.115.304,- dan realisasinya sebesar Rp140.931.115.304 atau 100%. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp152.741.332.512,- maka realisasi pembiayaan netto tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp11.810.217.208,- atau 0,08%.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp123.945.595.436,- Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp142.431.115.304,- maka realisasi SILPA Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp18.485.519.868,- atau 0,13%.

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2022, berikut hasil capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022:

Tabel 4.1
Data Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Kategori
1	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat	Rata Rata Lama Sekolah	9,95 tahun	10,95 tahun	110,05%	Sangat Baik
		Harapan Lama Sekolah	14,99 tahun	15,43 tahun	102,94%	Sangat Baik
2	Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga	Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan	58 %	190,17 %	327,88%	Sangat Baik
3	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peringkat dalam Porda	Ranking 5	Ranking 6	80,00%	Baik
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Angka Usia Harapan Hidup	77,4 tahun	77,72 tahun	100,41%	Sangat Baik
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,32 %	0,80%	139,39%	Sangat Baik
5	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Indeks/ Angka Kriminalitas	0,06	0,030	150,00%	Sangat Baik
6	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	kawasan wajah Kota yang tertata dengan baik	75 %	50 %	66,67%	Cukup
7	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana drainase, pengairan dan saluran pembuangan limbah	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	100 %	98,19%	98,19%	Baik

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Kategori
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	85	61,34	72,16%	Cukup
9	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	3,99 %	1,84%	153,88%	Sangat Baik
10	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk	Pertumbuhan ekonomi	5,45 %	5,53%	101,47%	Sangat Baik
		PDRB Perkapita (ribu rupiah)	73.893	78.987	106,89%	Sangat Baik
11	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan nilai investasi	3 %	-70,29%	-2342,91%	Kurang
		Tingkat pengangguran terbuka	5,73 %	5,58%	102,62%	Sangat Baik
12	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Prosentase Penduduk Miskin	4,7 %	4,73%	99,36%	Baik
		Skor Pola Pangan Harapan	92,2	95,1	103,15%	Sangat Baik
13	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Skor capaian Kota Layak Anak (KLA)	680	607,35	89,32%	Baik
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,2	95,44	98,19	Baik
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,57	79,29	97,20	Baik
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	84,2	84,35	100,18%	Sangat Baik

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Kategori
14	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	65	74,98	115,35%	Sangat Baik

Sumber : Data yang diolah

Hasil pengukuran kinerja terhadap 14 sasaran dengan 22 indikator kinerja utama berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga tahun 2022 disimpulkan bahwa **13** (tiga belas) Indikator Kinerja Utama atau **54,55%** dikategorikan **Sangat Baik**, **6** (enam) Indikator Kinerja Utama atau **27,27%** dikategorikan **Baik**, **2** (dua) Indikator Kinerja Utama atau **9,09%** dikategorikan **Cukup**, dan **1** (satu) Indikator Kinerja Utama atau **4,55%** dikategorikan **Kurang**.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pencapaian 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama, telah dianggarkan melalui APBD Kota Salatiga sebesar Rp1.046.499.128.242,- dengan realisasi sebesar Rp929.681.271.274,- atau sebesar 88,84%.

Berdasarkan data diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian 22 indikator kinerja Pemerintah Kota Salatiga sebesar 99,11%.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Salatiga tahun 2022. Semoga LKjIP Kota Salatiga Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

LAMPIRAN

LKjIP

KOTA SALATIGA
TAHUN 2022

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022			Kategori	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	PERANGKAT DAERAH
				Target	Realisasi	Capaian					
1	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,95	9,95	10,95	110,05	Sangat Baik	10,95	110,05	Tercapai	Dinas Pendidikan
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,99	14,99	15,43	102,94	Sangat Baik	15,43	102,94	Tercapai	Dinas Pendidikan
3	Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	58	58	190,17	327,88	Sangat Baik	190,17	327,88	Tercapai	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Peringkat dalam Porda	ranking	5	5	6	80,00	Baik	6	80,00	Akan Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	77,40	77,40	77,72	100,41	Sangat Baik	77,72	100,41	Tercapai	Dinas Kesehatan
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,32	1,32	0,80	139,39	Sangat Baik	0,80	139,39	Tercapai	Dinas Dalduk KB
7	Indeks/Angka Kriminalitas	nilai	0,06	0,06	0,030	150,00	Sangat Baik	0,03	150,00	Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satpol PP
8	Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik	%	75	75	50	66,67	Cukup	50	66,67	Upaya Keras	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Wilayah dengan Infrastruktur kondisi Baik	%	100	100	98,19	98,19	Baik	98,19	98,19	Akan Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai	85,00	85,00	61,34	72,16	Cukup	61,34	72,16	Upaya Keras	Dinas Lingkungan Hidup
11	Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	%	3,99	3,99	1,84	153,88	Sangat Baik	1,84	153,88	Tercapai	Dinas Perumahan dan Permukiman
12	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,45	5,45	5,53	101,47	Sangat Baik	5,53	101,47	Tercapai	
13	PDRB per Kapita (ribu rupiah)	ribu rupiah	73.893	73.893	78.987	106,89	Sangat Baik	78987,00	106,89	Tercapai	
14	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	3	3	-70,29	-2342,91	Kurang	-70,29	-2342,91	Upaya Keras	DPMPSTP

15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,73	5,73	5,58	102,62	Sangat Baik	5,58	102,62	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
16	Prosentase Penduduk Miskin	%	4,70	4,70	4,73	99,36	Baik	4,73	99,36	Akan Tercapai	Dinas Sosial
17	Skor Pola Pangan Harapan	nilai	92,20	92,20	95,1	103,15	Sangat Baik	95,10	103,15	Tercapai	Dinas Pangan dan Pertanian
18	Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	nilai	680,00	680,00	607,35	89,32	Baik	607,35	89,32	Akan Tercapai	Dinas P3APPKB
19	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	nilai	97,20	97,20	95,44	98,19	Baik	95,44	98,19	Akan Tercapai	Dinas P3APPKB
20	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	nilai	81,57	81,57	79,29	97,20	Baik	79,29	97,20	Akan Tercapai	Dinas P3APPKB
21	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	84,20	84,20	84,35	100,18	Sangat Baik	84,35	100,18	Tercapai	
22	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	65,00	65,00	74,98	115,35	Sangat Baik	74,98	115,35	Tercapai	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022			Kategori	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	PERANGKAT DAERAH
				Target	Realisasi	Capaian					
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
	PENDIDIKAN										
1	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	72	72	86,61	120,29	Sangat Baik	86,61	120,29	Tercapai	Dinas Pendidikan
2	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	100	100	99,23	99,23	Baik	99,23	99,23	Akan Tercapai	
3	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	97	97	90,56	93,36	Baik	90,56	93,36	Akan Tercapai	
	KESEHATAN										
4	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	117	117	133,69	85,74	Baik	133,69	85,74	Akan Tercapai	Dinas Kesehatan
5	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	10,75	10,75	10,25	104,65	Sangat Baik	10,25	104,65	Tercapai	
6	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,02	0,02	0,05	-50,00	Kurang	0,05	-50,00	Upaya Keras	
7	Success Rate TB	%	85	85	89,81	105,66	Sangat Baik	89,81	105,66	Tercapai	
8	Prevalensi Hipertensi Penduduk di atas usia 18 tahun	%	1,25	1,25	0,81	135,20	Sangat Baik	0,81	135,20	Tercapai	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
9	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	%	97,75	97,75	99,2	101,48	Sangat Baik	99,2	101,48	Tercapai	DPUPR
10	Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	%	53	53	89,13	168,17	Sangat Baik	89,13	168,17	Tercapai	
11	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	100	100	101,52	101,52	Sangat Baik	101,52	101,52	Tercapai	
12	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	100	100	95,73	95,73	Baik	95,73	95,73	Akan Tercapai	

	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
13	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	80,00	80,00	85,38	106,73	Sangat Baik	85,38	106,73	Tercapai	Dinas PKP
14	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	93,62	93,62	91,95	98,22	Baik	91,95	98,22	Akan Tercapai	
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
15	Cakupan Penegakan PERDA dan PERKADA	%	100	100	95	95,00	Baik	95	95,00	Akan Tercapai	Satpol PP
16	Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	/10.000 penduduk	2	2	1,17	141,50	Sangat Baik	1,17	141,50	Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	SOSIAL										
17	Cakupan Penanganan PMKS	%	21	21	88,44	421,14	Sangat Baik	88,44	421,14	Tercapai	Dinas Sosial
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										
	TENAGA KERJA										
18	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	62,4	62,4	96,76	155,06	Sangat Baik	96,76	155,06	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
19	Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	%	32,14	32,14	21,43	66,68	Cukup	21,43	66,68	Upaya Keras	Dinas P3APKKB
20	Persentase Perempuan dalam Parlemen	%	32	32	24	75,00	Baik	24	75,00	Upaya Keras	
21	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	41,89	41,89	39,73	94,84	Baik	39,73	94,84	Akan Tercapai	
	PANGAN										
22	Prevalance of undernourishment (PoU)	Skor	6,68	6,68	5,97	110,63	Sangat Baik	5,97	89,37	Akan Tercapai	Dinas Pangan dan Pertanian
	PERTANAHAN										
23	Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kota	%	90	90	100	111,11	Sangat Baik	100	111,11	Tercapai	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

LINGKUNGAN HIDUP											
24	Indeks Pencemaran Air	Nilai	47,87	47,87	45	94,00	Baik	45	94,00	Akan Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
25	Indeks Pencemaran Udara	Nilai	84,57	84,57	84,11	99,46	Baik	84,11	99,46	Akan Tercapai	
26	Indeks Tutupan Lahan	Nilai	59,38	59,38	47,28	79,62	Baik	47,28	79,62	Upaya Keras	
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	63,66	63,66	61,34	96,36	Baik	61,34	96,36	Akan Tercapai	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
28	Persentase cakupan akta kelahiran	%	95	95	99,07	104,28	Sangat Baik	99,07	104,28	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Persentase Penduduk ber KTP elektronik	%	100	100	96,26	96,26	Baik	96,26	96,26	Akan Tercapai	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
30	Peningkatan Swadaya Masyarakat	%	2	2	1,56	78	Baik	1,56	78,00	Upaya Keras	Sekretariat Daerah
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB											
31	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,4	2,4	1,84	123,33	Sangat Baik	1,84	123,33	Tercapai	Dinas Dalduk KB
PERHUBUNGAN											
32	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	%	80	80	60,11	75,14	Baik	60,11	75,14	Upaya Keras	Dinas Perhubungan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
33	Tingkat ketersediaan Media Informasi Publik	%	100	100	97,73	97,73	Baik	97,73	97,73	Akan Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
34	Tingkat Pengembangan Layanan e Government dan Smart City	%	100	100	87	87,00	Baik	87	87,00	Akan Tercapai	

KOPERASI DAN UKM											
35	Persentase Usaha Mikro Kecil yang dibina	%	69,86	69,86	84,55	121,03	Sangat Baik	84,55	121,03	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
36	Persentase KSP/USP koperasi sehat	%	8,53	8,53	10,75	126,03	Sangat Baik	10,75	126,03	Tercapai	
PENANAMAN MODAL											
37	Kenaikan Nilai Investasi PMA	Milyar Rupiah	314,749	314,749	289,111	91,85	Baik	289,111	91,85	Akan Tercapai	DPMPSTP
38	Kenaikan Nilai Investasi PMDN	Milyar Rupiah	166,578	166,578	101,195	60,75	Cukup	101,195	60,75	Upaya Keras	
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA											
39	Persentase Pemuda Berwirausaha	%	6	6	2,43	40,50	Kurang	2,43	40,50	Upaya Keras	Dinas Kepemudaan dan Olah raga
40	Persentase Atlet Berprestasi	%	28	28	35,38	126,36	Sangat Baik	35,38	126,36	Tercapai	
STATISTIK											
41	Persentase Ketersediaan Data Statistik	%	100	100	100	100	Sangat Baik	100	100,00	Tercapai	Dinas Kominfo
PERSANDIAN											
42	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	%	100	100	70,85	70,85	Cukup	70,85	70,85	Upaya Keras	Dinas Kominfo
		kriteria	baik/313	baik/313	cukup baik	cukup baik					
KEBUDAYAAN											
43	Persentase Kelompok Seni dan Komunitas Budaya yang dibina	%	64	64	100	156,25	Sangat Baik	100	156,25	Tercapai	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
44	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	10,2	10,2	22,86	224,12	Sangat Baik	22,86	224,12	Tercapai	
PERPUSTAKAAN											
45	Persentase Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan	%	90	90	570,08	633,42	Sangat Baik	570,08	633,42	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KEARSIPAN											
46	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Manajemen Arsip secara lebih selektif (e arsip)	%	37,5	37,5	100	266,67	Sangat Baik	100	266,67	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

URUSAN PILIHAN											
KELAUTAN DAN PERIKANAN											
47	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/Ha	1.000	810	715,58	88,34	Baik	715,58	71,56	Upaya Keras	Dinas Pangan dan Pertanian
PARIWISATA											
48	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	160.000	160.000	310.428	194,02	Sangat Baik	310428	194,02	Tercapai	
49	Persentase Peminat Transmigrasi	%	5	5	0	0	Kurang	0	0,00	Upaya Keras	Dispernaker
PERTANIAN											
50	Produktivitas Tanaman Pangan Utama										
	Padi	Ton/Ha	6,73	6,73	6,73	100,00	Sangat Baik	6,73	100,00	Tercapai	Dinas Pangan dan Pertanian
	Jagung	Ton/Ha	5,36	5,36	7,398	138,02	Sangat Baik	7,398	138,02	Tercapai	
51	Produksi Daging Sapi Potong	Kg	1.018.530	1.018.530	1701880	167,09	Sangat Baik	1701880	167,09	Tercapai	
PERDAGANGAN											
52	Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4,72	4,72	5,53	117,16	Sangat Baik	5,53	117,16	Tercapai	Dinas Perdagangan
PERINDUSTRIAN											
53	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	0,2	0,2	0	0	Kurang	0	0,00	Upaya Keras	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
PERENCANAAN											
54	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	42	42	50,21	119,55	Sangat Baik	50,21	119,55	Tercapai	Bappeda
55	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	Sangat Baik	100	100,00	Tercapai	Bappeda
56	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan APBD	%	100	100	100	100	Sangat Baik	100	100,00	Tercapai	Bappeda

	KEUANGAN										
57	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP					BPKPD
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
58	Indeks Profesionalitas ASN	Skor	90,6	90,6	54,74	60,42	Cukup	54,74	60,42	Upaya Keras	BKPSDM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
59	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	80	80,00	Baik	80	80,00	Akan Tercapai	Bappeda
PENGAWASAN											
60	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat	level	3	3	3	100	Sangat Baik	3	100,00	Tercapai	Inspektorat
61	Tingkat Maturitas SPIP	level	3	3	3	100	Sangat Baik	3	100,00	Tercapai	
FUNGSI LAINNYA											
62	Skor LAKIP/LKjIP	nilai	67,50	67,50	63,35	93,85	Baik	63,35	93,85	Akan Tercapai	Sekretariat Daerah
63	Persentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD	%	90	90	100	111,11	Sangat Baik	100	111,11	Tercapai	Sekretariat DPRD
64	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP Kecamatan Sidorejo	%	80	80	91,97	114,96	Sangat Baik	91,97	114,96	Tercapai	Kecamatan Sidorejo
65	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Sidorejo	%	100	100	100	100,00	Sangat Baik	100	100,00	Tercapai	
66	Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan Kecamatan Sidorejo	%	75	75	0	0,00	Kurang	0	0,00	Upaya Keras	
67	Persentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Sidorejo	%	45	45	55,61	123,58	Sangat Baik	55,61	123,58	Tercapai	

68	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sidorejo	%	91	91	91,25	100,27	Sangat Baik	91,25	100,27	Tercapai	
69	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP Kecamatan Tingkir	%	88	88	91,76	104,27	Sangat Baik	91,76	104,27	Tercapai	Kecamatan Tingkir
70	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Tingkir	%	86	86	100	116,28	Sangat Baik	100	116,28	Tercapai	
71	Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan Kecamatan Tingkir	%	85	85	40,82	48,02	Kurang	40,82	48,02	Upaya Keras	
72	Persentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Tingkir	%	60	60	64,12	106,87	Sangat Baik	64,12	106,87	Tercapai	
73	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tingkir	%	92	92	86,93	94,49	Baik	86,93	94,49	Akan Tercapai	
74	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP Kecamatan Argomulyo	%	82	82	59	71,95	Cukup	59	71,95	Upaya Keras	Kecamatan Argomulyo
75	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Argomulyo	%	100	100	100	100,00	Sangat Baik	100	100,00	Tercapai	
76	Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan Kecamatan Argomulyo	%	76	76	77,59	102,09	Sangat Baik	77,59	102,09	Tercapai	
77	Persentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Argomulyo	%	60	60	93,32	155,53	Sangat Baik	93,32	155,53	Tercapai	
78	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Argomulyo	%	79	79	81,38	103,01	Sangat Baik	81,38	103,01	Tercapai	

79	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP Kecamatan Sidomukti	%	80	80	90,14	112,68	Sangat Baik	90,14	112,68	Tercapai	Kecamatan Sidomukti
80	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Sidomukti	%	100	100	100	100,00	Sangat Baik	100	100,00	Tercapai	
81	Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan Kecamatan Sidomukti	%	75	75	0	0,00	Kurang	0	0,00	Upaya Keras	
82	Persentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Sidomukti	%	45	45	75,78	168,40	Sangat Baik	75,78	168,40	Tercapai	
83	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sidomukti	%	80	80	89,15	111,44	Sangat Baik	89,15	111,44	Tercapai	

LAMPIRAN

LKjIP

KOTA SALATIGA
TAHUN 2022

DATA CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	659.853.888.272	606.941.216.972	91,98
2	Program Pengelolaan Pendidikan	44.159.259.440	42.165.524.691	95,49
3	Program Pengembangan Kurikulum	5.240.000	5.240.000	100,00
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.842.577.000	18.051.963.585	86,61
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	121.088.972	97.744.800	80,72
6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	139.459.000	136.999.000	98,24
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	39.944.680.713	36.430.335.653	91,20
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	826.000.000	673.409.788	81,53
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	262.238.000	175.885.500	67,07
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.644.860.000	1.619.707.808	98,47
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.854.722.000	6.158.997.717	89,85

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.011.995.337	6.985.990.500	99,63
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.137.976.000	4.635.900.824	90,23
14	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	8.814.832.500	7.567.225.135	85,85
15	Program Penataan Bangunan Gedung	3.411.755.000	3.257.004.500	95,46
16	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	11.361.195.788	11.102.144.000	97,72
17	Program Penyelenggaraan Jalan	25.883.389.507	24.597.001.256	95,03
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.000.000.000	682.149.750	68,21
19	Program Pengembangan Perumahan	1.332.647.907	1.304.952.384	97,92
20	Program Kawasan Permukiman	2.775.242.405	2.614.839.614	94,22
21	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6.244.385.319	5.898.753.919	94,46
22	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	694.682.700	668.381.900	96,21
23	Program Penanggulangan Bencana	398.415.978	236.943.100	59,47

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
24	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	353.624.000	263.238.500	74,44
25	Program Pemberdayaan Sosial	865.700.000	848.635.200	98,03
26	Program Rehabilitasi Sosial	1.237.001.400	1.200.833.154	97,08
27	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.337.959.200	2.172.681.878	92,93
28	Program Penanganan Bencana	207.445.000	139.260.000	67,13
29	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	89.826.000	87.208.300	97,09
30	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.582.485.382	2.193.545.524	84,94
31	Program Penempatan Tenaga Kerja	90.174.000	87.150.000	96,65
32	Program Hubungan Industrial	69.548.000	66.053.000	94,97
33	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	212.981.000	198.676.500	93,28
34	Program Perlindungan Perempuan	103.790.000	78.920.500	76,04
35	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	708.900.000	636.163.660	89,74

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
36	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	163.128.000	134.195.500	82,26
37	Program Perlindungan Khusus Anak	107.692.600	103.532.500	96,14
38	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.567.736.300	1.503.429.300	95,90
39	Program Penanganan Kerawanan Pangan	35.025.800	26.773.600	76,44
40	Program Pengawasan Keamanan Pangan	56.432.100	48.567.300	86,06
41	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.648.360.700	1.486.425.550	90,18
42	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	15.718.900	4.650.550	29,59
43	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	442.281.200	398.717.940	90,15
44	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	102.702.000	87.949.500	85,64
45	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.261.948.275	1.139.489.950	90,30
46	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	5.725.091.634	5.467.448.649	95,50
47	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	174.828.900	43.090.337	24,65

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
48	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	83.324.000	49.292.500	59,16
49	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	126.313.900	91.383.200	72,35
50	Program Pengelolaan Persampahan	1.933.996.850	1.845.746.030	95,44
51	Program Pendaftaran Penduduk	949.915.400	732.698.691	77,13
52	Program Pencatatan Sipil	37.529.000	37.199.000	99,12
53	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	34.019.000	32.410.220	95,27
54	Program Pengendalian Penduduk	311.645.000	263.200.026	84,46
55	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.456.001.800	1.261.525.780	86,64
56	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.125.263.100	796.450.920	70,78
57	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.151.526.200	2.584.652.846	82,01
58	Program Informasi dan Komunikasi Publik	948.305.000	898.042.886	94,70
59	Program Aplikasi Informatika	3.218.781.800	3.207.605.526	99,65

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
60	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	48.919.800	48.746.500	99,65
61	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	29.559.800	29.553.650	99,98
62	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	277.743.000	277.293.000	99,84
63	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	470.593.000	443.763.000	94,30
64	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	602.705.400	565.894.000	93,89
65	Program Pengembangan UMKM	546.695.600	533.422.000	97,57
66	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	71.500.000	69.213.000	96,80
67	Program Promosi Penanaman Modal	339.500.000	314.955.000	92,77
68	Program Pelayanan Penanaman Modal	188.415.700	155.683.050	82,63
69	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	447.055.000	374.194.100	83,70
70	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.069.010.000	1.033.156.000	96,65
71	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.833.051.800	9.729.661.650	98,95

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
72	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	710.674.900	706.630.900	99,43
73	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	81.735.300	69.294.000	84,78
74	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	345.806.400	328.591.300	95,02
75	Program Pengembangan Kebudayaan	608.276.100	607.976.100	99,95
76	Program Pembinaan Sejarah	184.535.300	182.044.470	98,65
77	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	185.000.000	183.948.950	99,43
78	Program Pembinaan Perpustakaan	1.058.710.750	984.655.898	93,01
79	Program Pengelolaan Arsip	427.622.200	411.017.050	96,12
80	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	576.519.800	511.504.850	88,72
81	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	44.499.900	38.025.000	85,45
82	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.811.469.550	6.715.154.600	98,59
83	Program Pemasaran Pariwisata	245.766.800	233.633.500	95,06

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
84	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	603.983.100	550.442.800	91,14
85	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.348.605.150	1.293.889.000	95,94
86	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	738.169.000	516.462.000	69,97
87	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	291.085.200	283.482.800	97,39
88	Program Penyuluhan Pertanian	162.908.000	146.690.000	90,04
89	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	8.220.000	5.563.500	67,68
90	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.584.580.870	4.545.177.387	99,14
91	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	910.732.000	33.817.000	3,71
92	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	249.151.800	210.583.050	84,52
93	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	9.578.900	9.538.350	99,58
94	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	10.548.696.737	9.109.049.984	86,35
95	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	16.269.000	14.643.000	90,01

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
96	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.549.041.500	2.215.645.064	86,92
97	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.542.140.400	1.187.763.650	77,02
98	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	23.088.338.300	18.749.275.848	81,21
99	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.537.832.200	1.246.907.350	81,08
100	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.294.781.200	1.211.377.470	93,56
101	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	37.739.573.400	3.184.467.970	8,44
102	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.435.084.000	1.137.836.871	79,29
103	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	897.957.900	769.802.200	85,73
104	Program Kepegawaian Daerah	1.721.544.100	934.691.122	54,29
105	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.896.923.598	3.869.797.180	79,03
106	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	118.558.600	87.745.500	74,01
107	Program Penyelenggaraan Pengawasan	52.351.900	24.284.100	46,39

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
108	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	194.404.000	181.386.600	93,30
109	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	122.758.000	118.071.650	96,18
110	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	38.813.972.444	37.996.779.233	97,89
111	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	239.705.000	218.263.000	91,05
112	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.375.000	12.375.000	100,00
113	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	157.704.400	141.870.750	89,96
114	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	757.755.964	754.512.214	99,57
115	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.306.353.700	1.251.273.000	95,78
116	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	336.327.000	222.853.250	66,26
117	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	748.766.500	671.784.900	89,72
JUMLAH		1.046.499.128.242	929.681.271.274	88,84